



ANALISIS ICOR SEKTORAL *Daerah Istimewa Yogyakarta* **2012-2016**

**KERJA SAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017**

**ANALISIS ICOR SEKTORAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2012-2016**

**KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, pada umumnya pemerintah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah tingkat investasi. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan publikasi *Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016* bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Berdasarkan angka ICOR menurut lapangan usaha, maka dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama antara BPS dengan BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Bantul, Mei 2017

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Johaness De Britto Priyono

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis ICOR Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016”, sebagai hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Dalam publikasi ini, diuraikan distribusi investasi menurut sektor, dan juga dianalisis efisiensi investasi dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Yang lebih menarik dari publikasi ini adalah terdapat analisis kebutuhan dan pilihan investasi untuk suatu target pertumbuhan yang diinginkan. Kajian seperti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pendukung bagi pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kami berharap publikasi ini juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak terkait. Kami berkomitmen bahwa dengan mendapat masukan dari para pakar dari akademisi dan instansi teknis, publikasi ini akan lebih baik dalam format, substansi, maupun penyajiannya di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerjasama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin erat dan dapat memberikan sumbangan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Tavip Agus Rayanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Pelaksanaan	6
1.3. Ruang Lingkup.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sasaran dan Keluaran.....	8
1.6 Pembiayaan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian ICOR	10
2.2. Pengertian Investasi	14
2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.2.2. Perubahan Inventori	19
2.3. Pengertian Output	20
2.4. Pengertian Nilai Tambah	21
2.5. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III. METODOLOGI	26
3.1. Sumber Data.....	26
3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha.....	26

3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha	27
3.4. Metode Penghitungan ICOR	27
3.4.1. Metode Standar	27
3.4.2. Metode Akumulasi Investasi.....	29
3.4.3. <i>Time Lag</i> Investasi.....	30
3.4.4. Koefisien ICOR Negatif	30
3.4.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif	31
3.4.6. Asumsi Dasar	31
3.5. Indeks Perkembangan Agregat PDRB	32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	34
4.2. Perkembangan Nilai Investasi.....	39
4.3. Struktur Investasi.....	40
4.4. Angka ICOR Provinsi DIY	44
4.4.1. ICOR Total.....	44
4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha	47
4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi	60
4.6. Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi	68
BAB V. PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen).....	36
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen).....	38
Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabalnutra, 2012-2016 (persen)	39
Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi DIY, 2011-2016 (Juta Rp.).....	40
Tabel 4.5. Nilai Investasi di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016 (Juta Rupiah)	43
Tabel 4.6. Nilai Investasi di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2012-2016 (Juta Rupiah)	43
Tabel 4.7. ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2016	45
Tabel 4.8. ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2012-2016	46
Tabel 4.9. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2016	47
Tabel 4.10. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2012-2016	49
Tabel 4.11. ICOR Provinsi Jabalnutra (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2012-2016	50
Tabel 4.12. ICOR Provinsi Jabalnutra (Investasi = PMTB), 2012-2016.....	51
Tabel 4.13. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag=0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2012-2016	52
Tabel 4.14. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag=0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2012-2016	55

Tabel 4.15.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2016	56
Tabel 4.16.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2012-2016	57
Tabel 4.17.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan Konstan, dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2012-2016	59
Tabel 4.18.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2021	61
Tabel 4.19.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo, 2017-2021	61
Tabel 4.20.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, 2017-2021	62
Tabel 4.21.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2017-2021	63
Tabel 4.22.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2017-2021	63
Tabel 4.23.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, 2017-2021	64
Tabel 4.24.	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY Menurut Sektor, 2012-2016 (persen).....	65
Tabel 4.25.	Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di Provinsi DIY menurut Skala Usaha, 2016	67
Tabel 4.26.	Perkembangan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi di Provinsi DIY, 2012-2016	70

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 4.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB Provinsi DIY, 2012–2016 (persen)	34
Gambar 4.2.	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen).....	35
Gambar 4.3.	Distribusi PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)	37
Gambar 4.4.	Proporsi PMTB dan Perubahan Inventori Terhadap Total Investasi DIY, 2012-2016 (persen)	41
Gambar 4.5.	Struktur Investasi DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	41
Gambar 4.6.	Struktur Investasi di Provinsi DIY Menurut Kelompok Industri, 2012-2016 (persen)	42
Gambar 4.7.	Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2012-2016.....	44
Gambar 4.8.	Distribusi Usaha/Perusahaan Non-Pertanian di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota, 2016 (persen) .	67
Gambar 4.9.	Kesenjangan Investasi dan Tabungan	69
Gambar 4.10.	Perkembangan GDI dan GDS di Provinsi DIY, 2010-2016	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)	80
Lampiran 2. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	81
Lampiran 3. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)	82
Lampiran 4. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	83
Lampiran 5. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2012-2016 (Juta Rupiah)	84
Lampiran 6. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)	84
Lampiran 7. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2012-2016 (Juta Rupiah)	85
Lampiran 8. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)	85
Lampiran 9. PMTB + Perubahan Inventori, ICOR, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2016	86
Lampiran 10. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016 (juta rupiah)	86
Lampiran 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen).....	87
Lampiran 12. PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2016 (juta rupiah)	88
Lampiran 13. Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)	89

Lampiran 14. Peta Rencana Kawasan Strategis di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	90
Lampiran 15. Peta Pengembangan Kawasan Sentra Produksi D.I. Yogyakarta	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang dicapai. Sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan investasi akan meningkat (Todaro, 2003). Dalam setiap periode pemerintahan, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi tertentu. Untuk mencapai target laju pertumbuhan tersebut diperlukan jumlah investasi yang sesuai. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lebih banyak input dalam proses produksi.

Determinan penting yang berpengaruh terhadap pembentukan output perekonomian di suatu wilayah adalah stok kapital. Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar dinyatakan bahwa output merupakan fungsi dari stok kapital dan tenaga kerja pada tingkat teknologi tertentu (Hess and Ross, 1997). Investasi akan meningkatkan stok capital, sedangkan depresiasi/penyusutan akan mengurangi stok kapital (Mankiw, 2007). Kenaikan stok kapital akan meningkatkan kapasitas suatu wilayah dalam proses penciptaan output perekonomian. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara kuliah umum dalam rangka peringatan dies natalis ITS ke-50 tanggal 14 Desember 2010, mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menjadi penggerak dan mesin dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia, yaitu inovasi dan teknologi. SBY menyatakan bahwa inovasi dan teknologi harus menjadi *driver* dan *engine*. Inovasi merupakan *engine of progress* sehingga akan menimbulkan perubahan. Potensi produksi terletak pada sumber daya manusia (SDM), modal, dan teknologi informasi. Sutomo (2015) menyatakan bahwa *investment is the engine of*

economic growth, dengan pengertian bahwa faktor produksi yang berperan dalam menghasilkan output adalah investasi fisik (*ceteris paribus*).

Beberapa agenda pemerintah daerah terkait dengan investasi yang dirumuskan secara jelas dan komprehensif dapat mendorong pertumbuhan investasi di wilayah tersebut. Agenda-agenda dimaksud, antara lain: (i) merumuskan kebijakan investasi; (ii) memperbaiki peraturan dan regulasi; dan (iii) memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi (*one-roof system* atau *one-stop shop*); (iv) mengembangkan promosi daerah; (v) mengembangkan kemitraan (*partnership*); (vi) mengembangkan regional management; (vii) mengembangkan *business networking*; dan (viii) mempertajam strategi belanja publik (Salim, 2010).

Beberapa ahli ekonomi telah melakukan kajian tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena dan perkembangan teori yang memasukkan faktor eksternalitas berupa inovasi (*innovation*), teknologi (*technology*), kreativitas (*creativity*), jejaring (*networking*) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi yang meningkat pada gilirannya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi pada suatu daerah antara lain sebagai berikut:

1. **Tingkat bunga**; menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor) pada investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar) yang diterima lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito), dan menggunakannya untuk investasi.
2. **Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan**; mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya

investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

3. **Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.** Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat *demand* meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*induced invesment*).
4. **Keuntungan yang diperoleh perusahaan,** maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebahagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
5. **Situasi politik suatu negara;** akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor terutama pada investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor.
6. **Kemajuan teknologi,** dengan adanya temuan-temuan teknologi baru (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat efisiensi dari investasi yang dilakukan.
7. **Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah,** tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal, seperti jalan raya, listrik dan sisti````m komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Disamping itu adanya bentuk insentif yang diberikan pemerintah seperti keringanan-keringanan di dalam perpajakan (*tax holiday*) yaitu suatu keringanan di dalam pembebanan pajak yang diberikan kepada suatu perusahaan yang mau menanamkan modalnya.
8. **Kualitas sumber daya manusia;** Manusia yang berkualitas memiliki daya tarik investasi cukup penting sebab teknologi yang digunakan bagi pengusaha sangat modern sehingga menuntut ketrampilan yang lebih dari tenaga kerja.
9. **Kualitas sumber daya alam dan energi;** adanya sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah akan mengundang investor untuk masuk ke daerah

tersebut karena keunggulan komparatifnya. Selain itu, ketersediaan energi yang cukup memadai akan merupakan insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya. Kecukupan energi baik energi listrik maupun bahan bakar lainnya merupakan syarat utama karena hampir semua proses produksi mensyaratkan kebutuhan energi yang cukup.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988). Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Untuk melihat keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan indikator ICOR. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab

tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bahan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Kepala BPS Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Belanja;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: 14/DPA/2017.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Lingkup Materi

Lingkup kegiatan Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016 meliputi:

1. ICOR sektoral DIY dan ICOR agregat Kabupaten/Kota
2. Tahun data aktual 2012-2016 dan data proyeksi 2017-2021

1.3.2. Lingkup Wilayah

Penyusunan ICOR Sektoral mencakup seluruh wilayah DIY.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016 adalah untuk menyediakan kajian kebutuhan dan alokasi investasi menurut wilayah maupun menurut sektor sehingga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan DIY.

1.4.2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016, antara lain untuk:

- a. Menghitung tingkat investasi fisik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Menyediakan angka ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- c. Menyediakan hasil analisis deskriptif ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- d. Memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. Menyediakan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan perencanaan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1.5. Sasaran dan Keluaran

1.5.1. Sasaran

Tersusunnya dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016

1.5.2. Keluaran

Dokumen hasil Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016 yang mencakup:

- a. Perhitungan tingkat investasi fisik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Angka ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- c. Hasil analisis ICOR Sektoral tingkat Provinsi dan ICOR Agregat Kabupaten/kota;
- d. Perkiraan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. Rekomendasi sebagai bahan kebijakan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

1.6. Pembiayaan

Sumber dana pelaksanaan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016 dibebankan pada APBD DIY Tahun Anggaran 2017 (Balai Statistik Daerah Bappeda DIY).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian ICOR

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tertentu, sangat diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi dengan benar. Model Harold Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang dikenal dengan ICOR. Perhitungan ICOR sangat dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan dengan ICOR dapat dilihat seberapa efisien investasi yang ditanamkan pada priode tertentu.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Tambahan kapital diperoleh dari investasi.

Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh **R.F. Harrod** dan **Evsey Domar**. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic*

Journal. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri – sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod – Domar (Arsyad, 1988). Koefisien itu mengaitkan penambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut:

- Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
- Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio* = COR) dan rasio penambahan modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR) adalah tetap (Arsyad, 1988).

Dalam model pertumbuhan Harrod – Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$H1) \quad K = vY \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

$$H2) \quad L = uY \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

$$H3) \quad I = S \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

$$H4) \quad S = sY \quad \dots\dots\dots (2.4)$$

$$H5) \quad \Delta L/L = n \quad \dots\dots\dots (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \quad \dots\dots\dots (2.6)$$

keterangan:

Y = output
A = teknologi
K = stok kapital

- L = jumlah tenaga kerja
 I = investasi
 S = jumlah tabungan
 v = rasio kapital-output
 u = rasio tenaga kerja-output
 s = tingkat tabungan
 n = tingkat pertumbuhan tenaga kerja alami

Dengan asumsi $A = 1$, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \Delta K = v\Delta Y \dots\dots\dots (2.7)$$

$$H2') \Delta L = u\Delta Y \dots\dots\dots (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v\Delta Y/vY = \Delta Y/Y \dots\dots\dots (2.9)$$

$$\Delta L/L = u\Delta Y/uY = \Delta Y/Y \dots\dots\dots (2.10)$$

keterangan:

$\Delta Y/Y$ = laju pertumbuhan output

$\Delta K/K$ = laju pertumbuhan kapital

$\Delta L/L$ = laju pertumbuhan tenaga kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri, pada kondisi keseimbangan pasar barang maka $I = S$. Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, Investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K = I = S = sY \dots\dots\dots (2.11)$$

$$v\Delta Y = \Delta K = I = S = sY \dots\dots\dots (2.12)$$

$$v\Delta Y = sY \dots\dots\dots (2.13)$$

$$v\Delta Y/vY = sY/vY \dots\dots\dots (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \dots\dots\dots (2.15)$$

Beberapa kelemahan dari Teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut:

- a. Anggapan bahwa MPS dan ICOR konstan adalah anggapan yang terlalu kaku mengingat dalam jangka panjang mungkin sekali kedua variabel tersebut berubah.
- b. Teori Harrod – Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
- c. Model Harrod – Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.
- d. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

- (i) **Rasio Modal – Output** atau **Capital Output Ratio (COR)** atau sering disebut sebagai **Average Capital Output Ratio (ACOR)**, yaitu perbandingan antara kapital yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
- (ii) **Rasio Modal – Output Marginal** atau **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**, yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat **dinamis** karena menunjukkan perubahan /penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital.

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.16)$$

keterangan:

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Contoh:

Diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 5. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 5 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 4 miliar, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar Rp. 0,4 miliar, dibutuhkan investasi sebesar: $5 \times \text{Rp. 0,4 miliar} = \text{Rp. 2 miliar}$.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.17)$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.2. Pengertian Investasi

Investasi sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat

mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations (PBB)* mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, lebih ditekankan pada investasi fisik.

Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

- a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
- c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
- d. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. PMTB menurut jenis barang modal,
- b. PMTB menurut lapangan usaha/sector,
- c. PMTB menurut institusi.

a. PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

- 1) Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
- 2) Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
- 3) Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
- 4) [Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (*durable goods*)].
- 5) Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

b. PMTB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PMTB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanian, Kehutanan & Perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik & Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang

- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
- 8) Transportasi & Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
- 10) Informasi & Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan & Asuransi
- 12) Real Estate
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
- 17) Jasa lainnya

c. PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

- 1) Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
- 2) Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
- 3) Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.2.2. Perubahan Inventori

Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- 1) Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- 2) Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- 3) Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- 4) Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- 5) Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- 6) Ternak untuk tujuan dipotong;
- 7) Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- 8) Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.3. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- a. Barang-barang yang dihasilkan.
- b. Tenaga listrik yang dijual.
- c. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan

usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.4. Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.5. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang ICOR telah dilakukan beberapa kali. Badan Pusat Statistik telah melakukan penghitungan ICOR Sektor Industri Pengolahan pada tahun 1983, 1993, dan 1994 dengan menggunakan hasil survei tahunan Industri Besar dan Sedang. Hasil penghitungan tahun 1983 dan 1993 tidak dipublikasikan, sementara hasil penghitungan tahun 1994 telah dipublikasikan. Penghitungan ICOR tahun 1983 menggunakan series data tahun 1975-1981; kemudian pada tahun 1993 menggunakan series data tahun 1985-1990; dan pada penghitungan tahun 1994 menggunakan series data tahun 1980-1990. Ketiga penghitungan ICOR tersebut dilakukan untuk klasifikasi jenis barang 2 dan 3 digit ISIC.

Sebelum tahun 1985, Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang mengalami lewat cacah sehingga terjadi “*under coverage*” untuk jumlah perusahaan. Dalam mengatasi hal tersebut, BPS telah melakukan *backcasting* terhadap jumlah perusahaan agar cakupannya lebih lengkap. Pada penghitungan ICOR kedua (periode 1985-1990) telah digunakan nilai output sektor industri yang di-*backcast* sesuai dengan jumlah perusahaannya. Namun nilai investasi yang digunakan belum disesuaikan dengan cakupan yang lebih lengkap, sehingga nilai ICOR yang diperoleh relatif sangat rendah yang berkisar antara 1 sampai 2. Sebaliknya, pada penghitungan ICOR ketiga (periode 1980-1990) telah dilakukan *backcasting* terhadap nilai output dan investasi sehingga cakupan datanya sama, hal ini berpengaruh pada besaran ICOR yang dihasilkan relatif lebih baik.

Agar diperoleh satu nilai ICOR yang dapat mewakili suatu periode waktu untuk masing-masing klasifikasi industri digunakan penghitungan dengan rata-rata sederhana. Rumus yang digunakan pada penghitungan ICOR pertama dan kedua sebanyak 12 rumus standar. Sedangkan pada penghitungan ICOR sektor industri yang ketiga digunakan sebanyak 15 rumus standar yang juga digunakan pada penghitungan ICOR dalam publikasi ini. Sebagai pembanding, pada penghitungan ICOR ketiga dilakukan pula penghitungan berdasarkan akumulasi investasi dengan *lag* 0 yang pada dasarnya menerapkan prinsip rata-rata tertimbang. Selain itu pada penghitungan ICOR ketiga ini juga dilakukan penghitungan ICOR yang memperhitungkan selisih stok bahan baku, barang jadi, dan barang setengah jadi.

Pada penghitungan ICOR yang pertama dan kedua digunakan nilai output dan nilai investasi sektor industri pengolahan sebagai data dasar. Namun pada penghitungan ICOR ketiga digunakan nilai tambah sebagai proksi dari variabel output, dan *fixed capital formation* (pembentukan modal tetap bruto) sebagai proksi dari variabel investasi. Penggunaan variabel nilai tambah sebagai proksi dari output dilakukan untuk menghindari *double counting*, karena output suatu kegiatan bisa merupakan input dari kegiatan lainnya. Nilai tambah yang digunakan dalam penghitungan ini adalah seluruh nilai output yang telah dikurangi dengan seluruh input/biaya antara. Selanjutnya, komponen nilai

tambah yang bukan merupakan hasil pendayagunaan barang modal dikeluarkan dari seluruh nilai tambah.

Data sektor industri pengolahan skala besar dan sedang yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini merupakan data menurut harga berlaku sehingga masih terpengaruh oleh inflasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data/nilai menurut harga konstan digunakan suatu indeks sebagai deflator.

Pada penghitungan ICOR pertama digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sebagai deflator untuk nilai output pada masing-masing kode industri. Sementara deflator untuk nilai investasi pada penghitungan ICOR pertama adalah IHPB barang-barang modal yang dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Survei Khusus Barang Modal.

Pada penghitungan ICOR kedua dan ketiga, deflator yang digunakan untuk nilai output masih sama dengan penghitungan ICOR pertama, yaitu dengan menggunakan IHPB untuk masing-masing kode ISIC industri. Sedangkan deflator untuk investasi adalah rata-rata tertimbang IHPB dari kode ISIC 382 (industri mesin bukan mesin listrik), 383 (industri mesin listrik dan perlengkapannya), 384 (industri alat angkutan), dan 390 (industri lainnya) dengan penimbang output dari masing-masing kode di atas.

Penghitungan ICOR di Provinsi DIY dilakukan 9 (delapan) kali oleh BPS, yaitu pada tahun 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 bekerja sama dengan Bappeda Provinsi DIY. Pada tahun 2003 penghitungan ICOR mencakup rentang waktu 1998-2002, pada tahun 2009 mencakup rentang waktu 2004-2008, dan seterusnya hingga tahun 2016 mencakup rentang waktu 2011-2015. Metode yang digunakan adalah metode standar dan metode akumulasi. Variabel investasi direpresentasikan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perhitungan ICOR dilakukan dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan memasukkan perubahan inventori, serta tanpa memperhitungkan perubahan inventori.

Penyusunan ICOR sektoral tahun 2003 – 2015 mengacu pada klasifikasi PDRB yang terdiri dari 9 sektor ekonomi. Penyusunan ICOR DIY tahun 2003 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 1993 dan sisanya menggunakan data PDRB tahun dasar 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

umum sektor ekonomi DIY yang mempunyai nilai ICOR relatif rendah adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki nilai ICOR tinggi adalah sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sementara untuk penyusunan ICOR sektoral tahun 2016 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 2010 yang terdiri dari 17 kategori aktivitas ekonomi. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah. Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan mempunyai ICOR yang relatif tinggi.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Dalam penyusunan ICOR sektoral DIY 2012-2016, data yang digunakan bersumber dari hasil sensus dan survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: Sensus Ekonomi 2006, Survei Tahunan Industri Besar/Sedang, Survei Tahunan Perusahaan Air Minum, Survei Tahunan Konstruksi, Survei Khusus Pendapatan Regional, Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga, Survei Angkatan Kerja Nasional, serta survei lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan juga data dari penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut lapangan usaha (*by industry*) maupun menurut pengeluaran (*by expenditure*). Data PDRB yang digunakan dalam penyusunan ICOR DIY 2012-2016 menggunakan tahun dasar 2010. Pemanfaatan hasil sensus dan survei ini dilakukan karena penghitungan ICOR memerlukan sumber dan cakupan data yang cukup luas. Sebagai referensi, digunakan juga sumber data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Bidang Investasi/Badan Kerja sama dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) berupa data investasi PMA/PMDN yang disetujui maupun realisasi, dan Bank Indonesia Yogyakarta berupa data kredit investasi.

3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha

PMTB dihitung atas dasar harga konstan 2010, karena pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan PMTB menurut lapangan usaha menggunakan metode alokasi. Sebagai alokator adalah nilai penyusutan masing-masing sektor yang diperoleh pada penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan total investasi dihitung dari jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok.

Nilai penyusutan digunakan sebagai alokator berdasarkan pada pemikiran bahwa penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun tertentu akan

dipakai untuk investasi pada tahun itu juga. Ini berarti bahwa investasi mempunyai hubungan linier dengan nilai penyusutan, sehingga lapangan usaha yang mempunyai nilai penyusutan besar akan memiliki investasi yang besar pula.

3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha

Penghitungan pertambahan output (ΔY) didekati dengan pertambahan nilai tambah bruto (ΔNTB) menurut lapangan usaha. Sebagai contoh, peningkatan output pertanian tahun 2015 didekati dengan pengurangan nilai tambah pertanian pada tahun 2016 atas dasar harga konstan dengan nilai tambah pertanian pada tahun 2015 atas dasar harga konstan. Dengan perlakuan yang sama, pertambahan output menurut lapangan usaha dihitung sebagai pertambahan NTB menurut lapangan usaha.

Pendekatan di atas dilakukan karena data NTB tersedia dengan *time series* yang cukup panjang diturunkan dari penghitungan PDRB menurut lapangan usaha. Selain itu, untuk beberapa lapangan usaha yang outputnya berupa jasa, maka penghitungan nilai tambah akan lebih mudah dan lebih tepat.

3.4. Metode Penghitungan ICOR

Ada dua metode penghitungan ICOR yang digunakan, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Untuk tujuan keterbandingan, investasi didekati dengan dua cara, yaitu identik dengan PMTB dengan dan tanpa memperhitungkan Perubahan Inventori. Penghitungan ICOR periode 2012-2016 dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

3.4.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.1)$$

keterangan :

ΔK = pertambahan kapital/barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta K = I$ (investasi), maka rumus (3.1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.2)$$

Rumus (3.2) ini disebut dengan **Gross ICOR**, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (3.2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.3)$$

keterangan :

I = investasi pada tahun ke-t

Y_t = output pada tahun ke-t

Y_{t-1} = output pada tahun t-1

Rumus (3.3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 sampai t_n , sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n .

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.4)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan *inefficiency* yang sering terjadi dalam praktek.

3.4.2. Metode Akumulasi Investasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu t disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t .

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t_1 sampai t_n yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.5)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

3.4.3. *Time lag* Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut *time lag* (*lag*).

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke- t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor *time lag* dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \dots\dots\dots (3.6)$$

keterangan :

Time lag = 0, 1, 2, 3, 4, dst.

s = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

3.4.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

3.4.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

3.4.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan ICOR ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu output dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan **konsep Nilai Tambah**.

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah **ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*)**. Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat

mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.
2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.
2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam kajian ini hanya dibatasi selama periode 2012-2016.

3.5. Indeks Perkembangan Agregat PDRB

Indeks Perkembangan Agregat PDRB menunjukkan tingkat perkembangan agregat PDRB dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks ini diperoleh dengan membagi nilai PDRB menurut lapangan usaha pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks perkembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3.7)$$

keterangan :

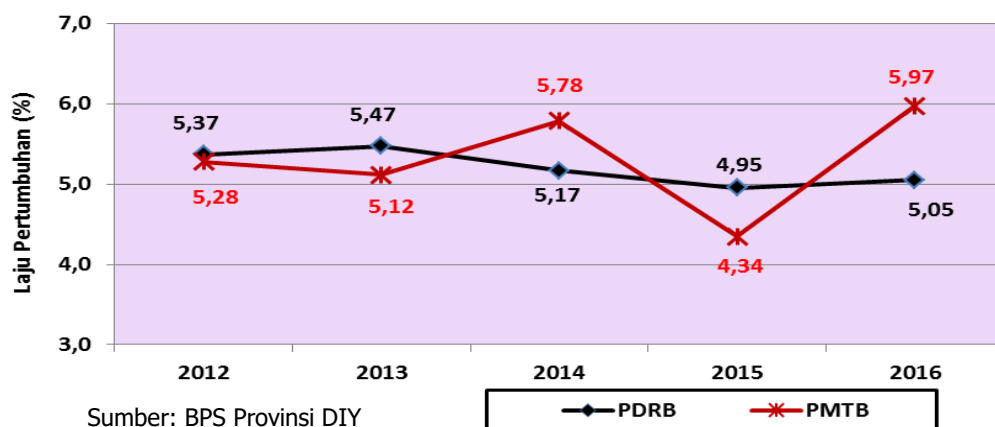
IP = Indeks Perkembangan
 i = lapangan usaha 1, ..., n
 t = tahun t
 0 = tahun dasar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

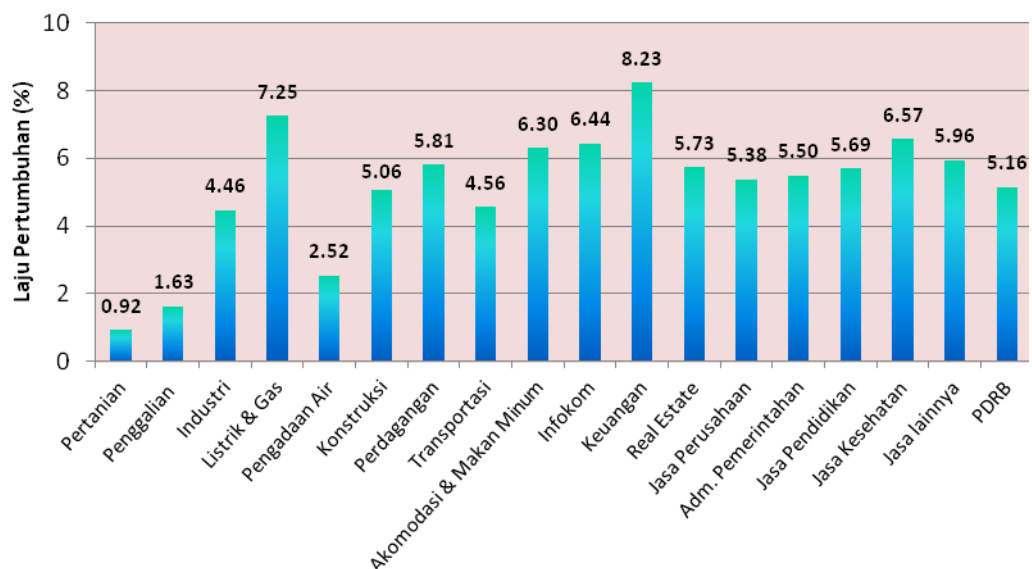
Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian wilayah secara riil adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). Gambar 4.1 menyajikan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PMTB di Provinsi DIY selama periode 2012-2016. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2012-2016 cenderung melambat, walaupun pada tahun 2013 sempat mengalami akselerasi dari 5,37 persen (2012) menjadi 5,47 persen (2013). Namun pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi DIY mengalami perlambatan menjadi 5,17 persen. Situasi politik yang cukup memanas sehubungan dengan adanya pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden dan kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 serta penurunan produksi pertanian turut andil pada perlambatan pertumbuhan ekonomi DIY. Perlambatan ekonomi DIY terus berlangsung hingga tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,95 persen. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi DIY sedikit mengalami peningkatan yaitu mencapai 5,05 persen seiring dengan pesatnya perkembangan aktivitas jasa informasi dan komunikasi.



Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB Provinsi DIY, 2012-2016 (persen)

Di sisi lain, pertumbuhan investasi fisik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, yang dicerminkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami fluktuasi selama periode 2012–2016. Secara umum pertumbuhan PMTB selama periode tersebut rata-rata di atas 5 (enam) persen, kecuali tahun 2015. Tercatat pertumbuhan investasi terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,34 persen dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,97 persen (Gambar 4.1).

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,16 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 6 persen per tahun adalah jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 8,23 persen; disusul oleh listrik dan gas sebesar 7,25 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,57 persen; informasi dan komunikasi sebesar 6,44 persen; serta penyediaan akomodasi dan makan/minum sebesar 6,30 persen. Selain listrik dan gas, keempat kategori lainnya termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier. Sedangkan lapangan usaha dengan rata-rata laju pertumbuhan di bawah 3 persen adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; serta pengadaan air yang tumbuh masing-masing sebesar 0,92 persen, 1,63 persen, dan 2,52 persen per tahun (Gambar 4.2). Dua kategori pertama termasuk dalam kelompok lapangan usaha primer.



Gambar 4.2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

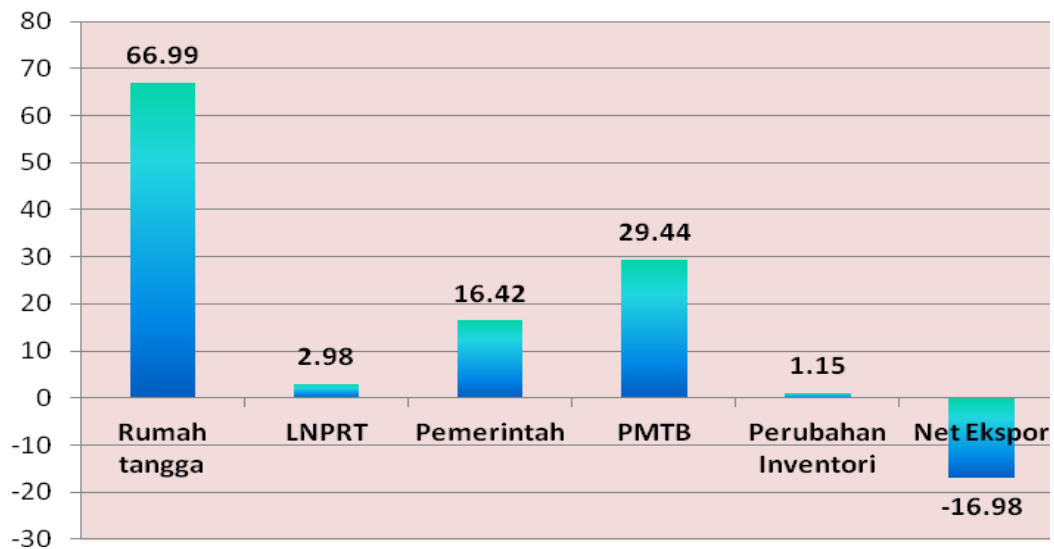
Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata 2012-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5,13	2,26	-2,10	2,11	1,46	0,92
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	5,55	2,33	-2,99	1,94	1,50	0,67
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,47	0,54	3,53	2,83	1,17	2,01
c. Perikanan	6,81	4,87	6,50	4,21	1,40	4,23
2. Pertambangan & Penggalian	1,67	3,92	2,11	0,13	0,42	1,63
3. Industri Pengolahan	-2,84	6,87	3,82	2,13	5,07	4,46
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,20	6,08	6,83	2,19	14,26	7,25
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,46	0,95	3,91	2,90	2,36	2,52
6. Konstruksi	4,46	4,94	5,65	4,24	5,42	5,06
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,66	5,26	5,69	6,19	6,09	5,81
8. Transportasi & Pergudangan	4,73	6,10	3,80	3,73	4,61	4,56
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,82	7,13	6,79	5,77	5,51	6,30
a. Penyediaan Akomodasi	11,81	8,51	4,93	7,17	8,16	7,18
b. Penyediaan Makan Minum	5,76	6,82	7,21	5,46	4,91	6,10
10. Informasi & Komunikasi	10,74	6,22	6,13	5,11	8,32	6,44
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,23	11,50	8,27	8,27	4,98	8,23
a. Jasa Perantara Keuangan	2,72	14,89	9,92	8,97	4,63	9,54
b. Lainnya	4,49	3,38	3,90	6,30	6,00	4,89
12. Real Estate	8,88	4,01	7,77	6,05	5,14	5,73
13. Jasa Perusahaan	7,99	3,27	7,61	7,31	3,43	5,38
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,49	4,94	5,90	5,57	5,57	5,50
15. Jasa Pendidikan	5,26	4,58	7,91	7,28	3,07	5,69
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,18	7,00	7,65	7,15	4,52	6,57
17. Jasa lainnya	4,28	4,86	5,29	8,00	5,70	5,96
PDRB	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi DIY menurut lapangan usaha selama periode 2012-2016 disajikan pada Tabel 4.1. Pada tahun 2016, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan di atas 5 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha listrik dan gas yang tumbuh sebesar 14,26 persen. Delapan lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 5 persen berturut-turut adalah sebagai berikut: informasi dan komunikasi (8,32%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,09%), jasa lainnya (5,70%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (5,57%),

penyediaan akomodasi dan makan-minum (5,51%), konstruksi (5,42%), real estate (5,14%), serta industri pengolahan (5,07%). Selama 5 tahun terakhir, selain industri pengolahan, delapan lapangan usaha tersebut di atas juga mempunyai rata-rata pertumbuhan tahunan di atas 5 persen.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.3. Distribusi PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)

Jika ditinjau dari sisi Pengeluaran, sebagian besar PDRB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Dalam periode 2012-2016, rata-rata porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga per tahun di DIY sebesar 66,99 persen dari total PDRB. Komponen terbesar kedua adalah PMTB dengan *share* mencapai 29,44 persen. Komponen terbesar ke tiga adalah konsumsi pemerintah dengan *share* rata-rata sebesar 16,42 persen. Sementara untuk pengeluaran konsumsi lembaga non-profit dan perubahan inventori kontribusinya masing-masing di bawah 3 persen. Secara umum, selama lima tahun terakhir produksi domestik di wilayah DIY belum bisa memenuhi total permintaan sehingga komponen ekspor netto bernilai negatif, yaitu sebesar -16,98 persen (Gambar 4.3). Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir Provinsi DIY mengalami defisit neraca perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa di wilayah DIY tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat di DIY. Hal ini bisa dijadikan peluang bagi produsen domestik untuk memproduksi barang dan jasa yang tadinya diimpor dari daerah lain karena potensi pasar di DIY relatif

besar. Namun demikian, dalam dalam pengembangan produk substitusi impor harus diperhitungkan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.

Laju pertumbuhan komponen pengeluaran selama periode 2012-2016 disajikan pada Tabel 4.2. Dalam kurun waktu 2012-2016, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah komponen perubahan inventori dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,75 persen per tahun. Kemudian disusul oleh komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba yang tumbuh rata-rata 5,57 persen per tahun. Laju pertumbuhan yang tinggi terjadi pada tahun 2012-2014. Tahun 2012 masih berlangsung proses recovery korban bencana alam pasca erupsi Gunung Merapi pada akhir tahun 2010. Sementara tahun 2013-2014 adalah momen persiapan hingga pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden pada tahun 2014. Namun demikian, andil pertumbuhan komponen perubahan inventori dan konsumsi lembaga swasta nirlaba terhadap perekonomian DIY relatif kecil. Komponen lainnya yang tumbuh di atas 5 persen per tahun adalah ekspor (5,42%) dan PMTB (5,30%).

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata 2012-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,44	4,85	4,94	4,74	4,82	4,83
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8,90	10,42	10,58	2,90	-1,13	5,57
3. Konsumsi Pemerintah	5,91	5,90	4,35	5,50	2,11	4,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,28	5,12	5,78	4,34	5,97	5,30
5. Perubahan Inventori	-1,02	3,44	11,78	4,73	7,24	6,75
6. Ekspor Barang dan Jasa	8,90	5,64	6,82	4,71	4,52	5,42
7. Impor Barang dan Jasa	9,85	5,08	6,85	4,26	3,72	4,97
PDRB	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Jika diamati selama lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung melambat dari 6,44 persen pada tahun 2012 menjadi 4,82 persen di tahun 2016. Di sisi lain, komponen investasi fisik (PMTB) agak berfluktuasi dan cenderung meningkat dari 5,28 persen pada tahun 2012 menjadi 5,97 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan PMTB merupakan indikator

peningkatan investasi di DIY. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan ada upaya yang cukup keras untuk meningkatkan laju pertumbuhan PMTB pada level 6-7 persen. Di sisi lain volume perdagangan antar wilayah menunjukkan peningkatan baik ekspor maupun impor, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Nilai ekspor maupun impor DIY mencapai lebih dari 50 persen dari total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY semakin terbuka dengan wilayah luar DIY.

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), selama lima tahun terakhir Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen per tahun. Angka ini terendah di kawasan Jabalnusra namun sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang mencapai 5,11 persen. Semua provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tumbuh di atas 5 (lima) persen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi NTB sebesar 9,26 persen, diikuti Provinsi Bali dan DKI Jakarta dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun masing-masing sebesar 6,42 persen dan 5,93 persen. Semua provinsi di Pulau Jawa laju pertumbuhannya di bawah 6 persen per tahun (tabel 4.3).

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabalnusra, 2012-2016 (persen)

Provinsi	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata 2012-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	6,53	6,07	5,91	5,89	5,85	5,93
Jawa Barat	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67	5,53
Jawa Tengah	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28	5,28
DIY	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16
Jawa Timur	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55	5,73
Banten	6,83	6,67	5,51	5,40	5,26	5,71
Bali	6,96	6,69	6,73	6,03	6,24	6,42
NTB	-1,54	5,16	5,17	21,77	5,82	9,26
NTT	5,46	5,41	5,05	5,03	5,18	5,17
Indonesia	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02	5,11

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

4.2. Perkembangan Nilai Investasi

Besarnya investasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang diperoleh

pada setiap tambahan satu unit kapital dalam proses produksi dengan faktor produksi yang lain konstan (*ceteris paribus*). Investasi akan dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga yang akan diterimanya seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Dalam penyusunan ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta, konsep investasi mencakup pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori (Δ inventori). Berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011–2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai Rp. 19,06 triliun, kemudian terus meningkat menjadi Rp. 24,66 triliun pada tahun 2016 (Tabel 4.4). Secara umum rata-rata pertumbuhan investasi di DIY selama periode 2011-2016 sebesar 5,29 persen per tahun.

Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi DIY, 2011–2016 (Juta Rp.)

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
2011	19 325 555	935 146	20 260 700	18 245 345	813 139	19 058 485
2012	21 148 871	969 334	22 118 205	19 207 890	804 880	20 012 770
2013	24 250 704	967 150	25 217 854	20 190 810	832 540	21 023 350
2014	27 744 794	980 197	28 724 991	21 358 622	930 599	22 289 222
2015*	30 798 881	1 151 797	31 950 678	22 286 615	974 645	23 261 260
2016**	33 428 978	1 295 788	34 724 766	23 616 948	1 045 164	24 662 112

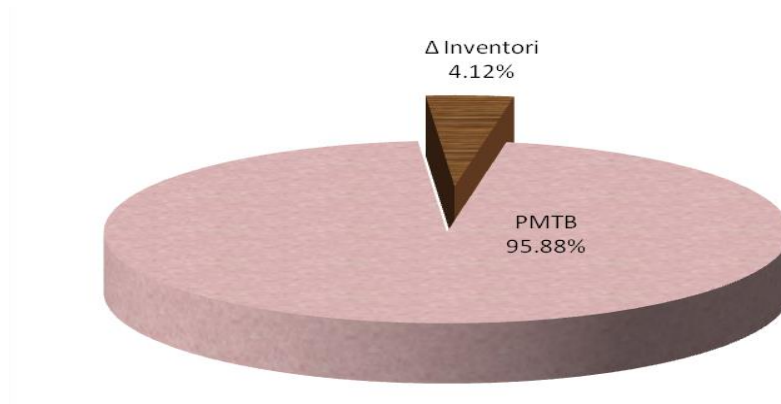
Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.3. Struktur Investasi

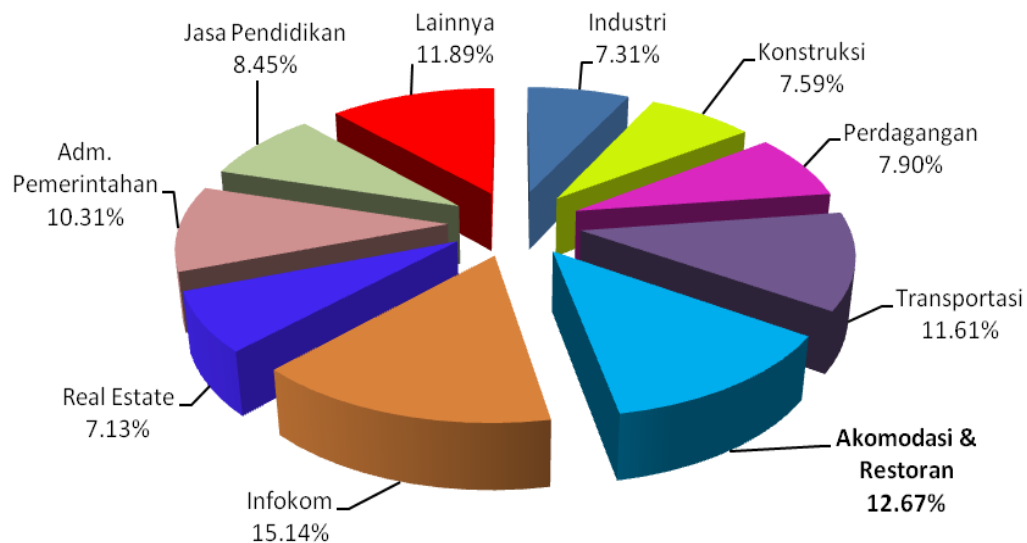
Jika investasi dibagi menjadi dua komponen yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori, maka selama periode 2012-2016 rata-rata proporsi PMTB mencapai 95,88 persen dari total investasi, sedangkan perubahan inventori hanya sebesar 4,12 persen (Gambar 4.4). PMTB merupakan investasi fisik dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, *cultivated biological resources*, dan peralatan lainnya. Sedangkan perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir dikurangi dengan posisi stok

pada awal tahun. Perubahan inventori mencakup stok dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.4. Proporsi PMTB dan Perubahan Inventori terhadap Total Investasi DIY, 2012-2016 (persen)



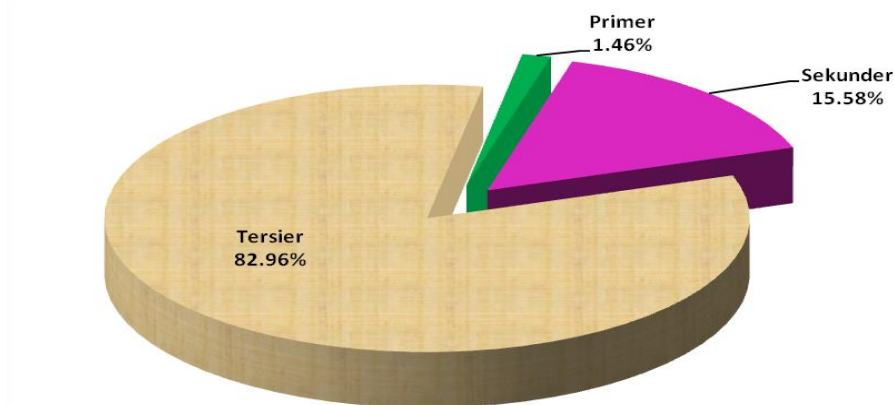
Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.5. Struktur Investasi DIY menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Berdasarkan lapangan usaha, investasi terbesar selama periode 2012-2016 terjadi pada aktivitas informasi dan komunikasi sebesar 15,14 persen. Selain jasa infokom, investasi yang cukup besar dilakukan pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum; pengangkutan dan perdagangan; serta administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib dengan nilai investasi masing-masing sebesar 12,67 persen, 11,61 persen, dan 10,31 persen

dari total investasi di DIY. Lapangan usaha lainnya dengan share di atas 7 persen berturut-turut adalah jasa pendidikan (8,45%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (7,90%); konstruksi (7,59%); industri pengolahan (7,31%); serta real estate (7,13%). Sedangkan lapangan usaha yang lain kontribusinya relatif kecil yaitu rata-rata di bawah 4 persen (Gambar 4.5).

Selanjutnya jika ditinjau menurut kelompok industri selama periode pengamatan, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok industri tersier yaitu 82,96 persen, diikuti kelompok industri sekunder (15,58 persen), dan kelompok industri primer (1,46 persen). Kelompok industri primer meliputi pertanian dan penggalian; kelompok industri sekunder terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sisanya merupakan kelompok industri tersier (Gambar 4.6).



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.6. Struktur Investasi di Provinsi DIY menurut Kelompok Industri, 2012-2016 (persen)

Ditinjau secara spasial, rata-rata investasi per tahun menurut kabupaten/kota atas dasar harga berlaku selama periode 2012-2016 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar Rp 11,63 triliun. Investasi di Kabupaten Sleman tersebut menyumbang sekitar 40,73 persen terhadap total investasi di DIY. Kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta Rp 6,74 triliun, Kabupaten Bantul Rp 4,47 triliun, Kabupaten Gunungkidul Rp 3,49 triliun, dan terendah di Kabupaten Kulonprogo Rp 2,22 triliun dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,62 persen, 15,67 persen, 12,21 persen, dan 7,78 persen (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Nilai Investasi di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.740.627 (7,87)	1.973.552 (7,84)	2.241.009 (7,81)	2.471.811 (7,74)	2.674.299 (7,68)	2.220.260 (7,78)
Bantul	3.451.784 (15,60)	3.918.392 (15,56)	4.464.208 (15,56)	5.042.746 (15,79)	5.488.684 (15,76)	4.473.163 (15,67)
Gunungkidul	2.751.888 (12,44)	3.116.754 (12,38)	3.516.614 (12,26)	3.838.253 (12,02)	4.206.916 (12,08)	3.486.085 (12,21)
Sleman	8.887.290 (40,18)	10.176.525 (40,41)	11.627.272 (40,53)	13.070.196 (40,93)	14.374.488 (41,29)	11.627.154 (40,73)
Yogyakarta	5.289.493 (23,91)	5.999.960 (23,82)	6.840.659 (23,84)	7.509.373 (23,52)	8.073.129 (23,19)	6.742.523 (23,62)
Jumlah	22.121.081 (100,00)	25.185.184 (100,00)	28.689.762 (100,00)	31.932.378 (100,00)	34.817.517 (100,00)	28.549.184 (100,00)

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara
Angka dalam kurung adalah share terhadap total**Tabel 4.6. Nilai Investasi di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2012-2016 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.547.101 (7,71)	1.615.213 (7,66)	1.707.632 (7,66)	1.779.537 (7,65)	1.889.487 (7,66)	1.707.794 (7,67)
Bantul	3.131.690 (15,62)	3.290.941 (15,61)	3.474.115 (15,58)	3.639.678 (15,65)	3.865.792 (15,67)	3.480.443 (15,62)
Gunungkidul	2.470.653 (12,32)	2.582.320 (12,25)	2.711.059 (12,16)	2.834.167 (12,18)	3.000.402 (12,16)	2.719.720 (12,21)
Sleman	8.079.849 (40,29)	8.532.740 (40,46)	9.053.826 (40,60)	9.462.039 (40,67)	10.062.766 (40,79)	9.038.244 (40,57)
Yogyakarta	4.824.221 (24,06)	5.066.226 (24,02)	5.353.640 (24,01)	5.548.038 (23,85)	5.853.985 (23,73)	5.329.222 (23,92)
Jumlah	20.053.513 (100,00)	21.087.441 (100,00)	22.300.272 (100,00)	23.263.461 (100,00)	24.672.432 (100,00)	22.275.424 (100,00)

Sumber: Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

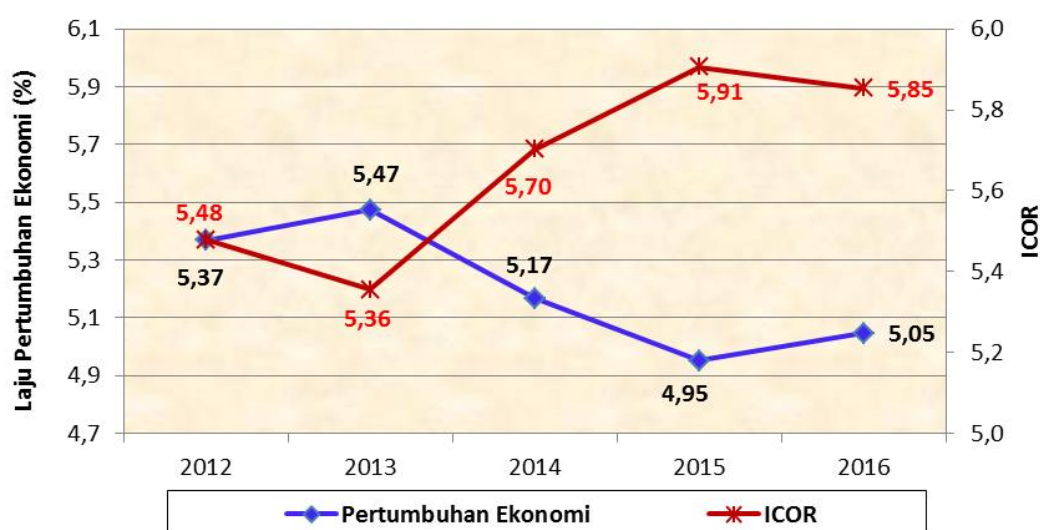
Keterangan: * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara
Angka dalam kurung adalah share terhadap total

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai investasi tertinggi selama periode 2012-2016 juga dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar Rp 9,04 triliun. Investasi di Kabupaten Sleman tersebut menyumbang sekitar 40,57 persen terhadap total investasi di DIY. Kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp 5,33 triliun (23,92%), Kabupaten Bantul Rp 3,48 triliun (15,62%), Kabupaten Gunungkidul Rp 2,72 triliun (12,21%), dan terendah di Kabupaten Kulonprogo Rp 1,71 triliun (7,67%) (Tabel 4.6). Struktur investasi secara spasial atas harga konstan 2010 hampir sama dengan harga berlaku.

4.4. Angka ICOR Provinsi DIY

4.4.1. ICOR Total

Gambar 4.7 menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR DIY selama periode 2012-2016. Pada tahun 2016 angka ICOR DIY turun dari 5,91 pada tahun 2015 menjadi 5,85 pada tahun 2016. Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 angka ICOR DIY per tahun relatif tinggi yaitu di atas 5 (lima). Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di DIY relatif kurang efisien. Pada tahun 2013, ICOR DIY cenderung mengecil dari 5,48 (2012) menjadi 5,36 (2013).



Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2012-2016

Pada tahun 2014 dan 2015 angka ICOR DIY cenderung meningkat, kemudian sedikit menurun pada tahun 2016 walaupun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2013. Hal ini bisa diartikan bahwa investasi yang dilakukan relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di DIY cenderung bersifat *capital intensive*. Pada tahun 2016, untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,85 unit, sedangkan pada tahun 2013 hanya diperlukan tambahan investasi sebesar 5,36 unit. Secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Pada level kabupaten/kota, tampak bahwa pada tahun 2016 ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman 6,82, diikuti Kabupaten Kulonprogo sebesar 6,32, Kabupaten Gunungkidul 5,50, Kota Yogyakarta 5,11, dan terendah Kabupaten Bantul sebesar 4,90 (Tabel 4.7).

Tabel 4.7. ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,76	6,06	6,50	6,41	6,32	6,41
Bantul	4,62	4,50	4,88	4,94	4,90	4,76
Gunungkidul	5,52	5,36	5,86	5,53	5,50	5,56
Sleman	6,16	6,05	6,73	6,83	6,82	6,52
Yogyakarta	4,91	4,82	5,01	5,11	5,11	4,99
D.I. Yogyakarta	5,48	5,36	5,70	5,91	5,85	5,66

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Tingginya ICOR di Kabupaten Sleman antara lain disebabkan oleh jenis investasi yang ditanamkan biasanya padat modal. Lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Sleman adalah industri pengolahan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di wilayah Sleman, meskipun masih didominasi oleh industri makanan dan minuman, namun peranan industri tekstil dan pakaian jadi cukup besar. Industri tekstil lebih bersifat kapital intensive. Pembangunan hotel berbintang juga cukup banyak dilakukan selama lima tahun terakhir. Selain itu, peranan lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang bersifat padat modal di wilayah ini juga cukup besar.

Sebaliknya, rendahnya ICOR di Kota kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh peranan pertanian yang cukup besar di wilayah ini. Seperti diketahui bahwa lapangan usaha ini mempunyai ICOR yang relatif kecil. Sementara industri yang dominan di Kabupaten Bantul adalah industri makanan dan minuman yang sebagian besar merupakan industri kecil/rumah tangga dengan barang modal yang relatif kecil. Jasa akomodasi kebanyakan berupa hotel non-bintang.

Rata-rata ICOR kabupaten/kota di DIY selama periode 2012-2016 hampir sejalan dengan nilai ICOR kabupaten/kota pada tahun 2016. Selama periode pengamatan, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 6,52; diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo 6,41; Kabupaten Gunungkidul 5,56; Kota Yogyakarta sebesar 4,99; dan terendah Kabupaten Bantul 4,76. Tingginya ICOR di Kabupaten Kulonprogo seiring dengan persiapan pembangunan bandara di wilayah tersebut, sehingga perbaikan infrastruktur berupa jalan semakin ditingkatkan.

Angka ICOR dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari PMTB saja menghasilkan angka ICOR dengan urutan yang hampir sama. Selama periode 2012-2016 rata-rata ICOR tertinggi terjadi Kabupaten Kulonprogo (6,27), diikuti oleh Kabupaten Sleman (6,22), Kabupaten Gunungkidul (5,31), Kota Yogyakarta (4,79), dan terendah Kabupaten Bantul (4,59) (Tabel 4.8).

Tabel 4.8. ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2012-2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,61	5,93	6,36	6,27	6,18	6,27
Bantul	4,45	4,34	4,69	4,75	4,71	4,59
Gunungkidul	5,28	5,14	5,60	5,28	5,26	5,31
Sleman	5,88	5,78	6,42	6,52	6,51	6,22
Yogyakarta	4,71	4,63	4,80	4,89	4,89	4,79
D.I. Yogyakarta	5,26	5,14	5,46	5,66	5,61	5,43

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha

4.4.2.1. ICOR menurut Lapangan Usaha Tahunan

Tabel 4.9 menyajikan ICOR Tahunan menurut lapangan usaha dengan pendekatan investasi merupakan penjumlahan dari PMTB ditambah perubahan inventori. ICOR tahunan dihitung dengan lag 0 mengandung arti investasi yang dilakukan pada tahun t akan menghasilkan nilai tambah pada tahun yang sama.

Tabel 4.9. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,18	1,95	1,87	2,36	2,71
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,19	1,94	1,98	2,32	2,69
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	4,23	4,09	3,01	3,01	3,60
c. Perikanan	1,57	1,52	1,58	1,78	1,65
2. Pertambangan & Penggalian	3,16	3,06	3,18	3,59	3,33
3. Industri Pengolahan	4,77	5,03	5,63	5,30	5,23
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,79	14,28	14,86	15,23	15,82
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,68	5,49	5,70	6,44	5,98
6. Konstruksi	4,63	4,48	4,65	5,25	4,87
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,35	4,21	4,40	4,85	4,58
8. Transportasi & Pergudangan	14,47	13,29	12,60	13,47	13,75
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,97	6,02	6,51	7,04	6,38
a. Penyediaan Akomodasi	3,85	3,72	3,87	4,37	4,05
b. Penyediaan Makan Minum	6,89	6,67	6,93	7,82	7,26
10. Informasi & Komunikasi	5,75	5,56	5,78	6,39	6,05
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,14	2,43	2,62	3,11	3,12
a. Jasa Perantara Keuangan	2,35	2,27	2,36	2,66	2,47
b. Lainnya	4,31	4,16	4,44	4,89	4,55
12. Real Estate	4,62	4,46	4,64	4,78	4,84
13. Jasa Perusahaan	5,32	5,14	5,34	6,04	5,60
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,70	6,47	6,73	7,60	7,05
15. Jasa Pendidikan	4,93	4,77	4,96	5,60	5,19
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,31	5,13	5,33	6,02	5,59
17. Jasa lainnya	5,13	4,96	5,15	5,82	5,40
PDRB	5,48	5,36	5,70	5,91	5,85

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka ICOR DIY bervariasi menurut lapangan usaha. Beberapa hal yang bisa dicermati, antara lain:

Pertama, nilai ICOR pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengindikasikan bahwa perekonomian DIY semakin efisien. Pada tahun 2012 ICOR masih relatif tinggi yaitu sebesar 5,48 kemudian turun menjadi 5,36 pada tahun 2013. Kondisi perekonomian yang semakin baik menyebabkan pertumbuhan nilai tambah mengalami akselerasi dari 5,37 persen pada tahun 2012 menjadi 5,47 persen di tahun 2013. Membaiknya angka ICOR pada tahun 2013 disebabkan oleh upaya yang cukup keras dari pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan disamping kondisi makroekonomi perekonomian nasional dan regional yang semakin kondusif sehingga perekonomian DIY mampu tumbuh cukup baik. ICOR tahun 2014 dan 2015 terus meningkat seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi DIY.

Kedua, lapangan usaha pertanian; pertambangan dan penggalan; serta jasa keuangan dan asuransi mempunyai ICOR yang relatif kecil dibandingkan lapangan usaha lainnya dengan nilai ICOR di bawah 4. Nilai ICOR lapangan usaha pertanian relatif rendah karena proses produksi yang relatif pendek dan proporsi investasi dibanding biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha tani relatif kecil. Demikian juga untuk pertambangan dan penggalan, proses produksinya juga relatif pendek dan tidak memerlukan investasi yang besar karena pada umumnya kegiatan penggalan di DIY berupa penggalan batu dan pasir yang tidak memerlukan modal besar. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang relatif besar dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat *capital intensive*.

Ketiga, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan perdagangan mempunyai ICOR relatif tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan karakter lapangan usaha tersebut yang bersifat padat modal dan biasanya investasinya bersifat jangka panjang.

Keempat, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mempunyai nilai ICOR relatif tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena investasi pemerintah biasanya ditujukan untuk fasilitas pelayanan publik seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang tujuan utamanya bukan mencari profit.

Sebagai bahan perbandingan, pada Tabel 4.10 disajikan hasil perhitungan angka ICOR Lapangan Usaha tahunan 2012-2016 dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari komponen PMTB saja. Secara umum, angka ICOR dengan pendekatan ini menghasilkan angka yang lebih rendah.

Tabel 4.10. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,09	1,87	1,79	2,27	2,60
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,10	1,86	1,89	2,22	2,57
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	4,06	3,93	2,88	2,89	3,45
c. Perikanan	1,51	1,46	1,51	1,71	1,58
2. Pertambangan & Penggalian	3,04	2,94	3,05	3,44	3,19
3. Industri Pengolahan	4,58	4,83	5,39	5,08	5,01
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,20	13,71	14,24	14,59	15,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,45	5,27	5,47	6,17	5,72
6. Konstruksi	4,44	4,30	4,46	5,03	4,67
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,17	4,05	4,21	4,65	4,39
8. Transportasi & Pergudangan	13,88	12,76	12,07	12,91	13,17
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,73	5,78	6,24	6,74	6,11
a. Penyediaan Akomodasi	3,69	3,57	3,70	4,18	3,88
b. Penyediaan Makan Minum	6,62	6,40	6,64	7,50	6,95
10. Informasi & Komunikasi	5,52	5,34	5,54	6,13	5,79
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,01	2,34	2,52	2,98	2,98
a. Jasa Perantara Keuangan	2,25	2,18	2,26	2,55	2,37
b. Lainnya	4,13	4,00	4,25	4,69	4,36
12. Real Estate	4,43	4,29	4,44	4,58	4,63
13. Jasa Perusahaan	5,11	4,94	5,12	5,78	5,36
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,43	6,22	6,44	7,28	6,75
15. Jasa Pendidikan	4,74	4,58	4,75	5,36	4,97
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,09	4,93	5,11	5,77	5,35
17. Jasa lainnya	4,92	4,76	4,94	5,57	5,17
PDRB	5,26	5,14	5,46	5,66	5,61

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), pada tahun 2016 ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka tertinggi ke-lima di bawah Provinsi NTT, DKI

Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah dengan ICOR masing-masing sebesar 8,96; 7,93; 5,92; dan 5,89 (Tabel 4.11). Nilai ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jabalnusra bisa disebabkan oleh: (1) pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir berada pada posisi bawah, (2) dari sisi efisiensi investasi, belum sebgus provinsi lain baik dari segi nilainya, infrastruktur, akses perijinan dan penataan kawasannya, dan (3) skala usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh perusahaan mikro kecil (UMK) sehingga jika dilihat tingkat produktivitas/efisiensinya biasanya lebih rendah dari pada perusahaan yang mempunyai skala usaha menengah/besar (UMB) dalam hal penerapan teknologi produksi. Angka ICOR DKI yang relatif tinggi bisa disebabkan oleh pengembangan lapangan usaha yang lebih bersifat padat modal.

Tabel 4.11. ICOR Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2012-2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	7,85	8,39	8,39	8,16	7,93
Jawa Barat	5,40	4,93	6,08	5,91	5,22
Jawa Tengah	6,81	6,58	6,19	5,66	5,89
DIY	5,48	5,36	5,70	5,91	5,85
Jawa Timur	4,50	4,85	5,44	5,75	5,46
Banten	5,29	5,12	5,83	5,84	5,92
Bali	5,43	5,46	5,15	5,66	5,61
NTB	-20,61	6,48	6,47	1,62	5,40
NTT	7,37	7,04	8,83	9,36	8,96
Indonesia	6,15	6,47	7,19	7,24	7,06

Sumber: BPS (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Nilai ICOR DIY dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori berada pada urutan ke-4 pada tahun 2012 dan 2015. Kemudian pada tahun 2013 berada pada urutan ke-6; tahun 2014 menempati urutan ke-7; dan tahun 2016 menempati urutan ke-5 (Tabel 4.11). Penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB saja menghasilkan urutan angka ICOR yang relatif hampir sama dengan kondisi memperhitungkan perubahan inventori (Tabel 4.12).

Tabel 4.12. ICOR Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB), 2012-2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	7,81	8,34	8,32	8,09	7,82
Jawa Barat	4,32	4,12	5,16	5,17	4,57
Jawa Tengah	5,77	5,98	5,76	5,55	5,77
DIY	5,26	5,14	5,46	5,66	5,61
Jawa Timur	4,49	4,83	4,93	5,31	5,24
Banten	4,87	4,84	5,65	5,78	5,91
Bali	5,22	5,33	5,05	5,64	5,59
NTB	-21,19	6,48	6,36	1,60	5,33
NTT	6,26	6,67	8,53	9,12	8,86
Indonesia	5,75	6,18	6,79	6,97	6,75

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.4.2.2. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi

Sebagaimana diketahui koefisien ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Pada metode akumulasi, nilai investasi dan tambahan output merupakan akumulasi selama periode 2012 sampai dengan 2016. Dalam penghitungan ini juga dilakukan dengan dua pendekatan investasi yaitu **dengan** dan **tanpa** memperhitungkan perubahan inventori.

Hasil perhitungan besaran koefisien ICOR Lapangan Usaha dengan metode akumulasi pada periode 2012-2016 di DIY baik melalui pendekatan investasi dengan atau tanpa perubahan inventori disajikan pada Tabel 4.13. Besaran koefisien ICOR DIY dengan metode akumulasi selama periode 2012-2016 mencapai 5,66 (dengan perubahan inventori) dan 5,43 (tanpa perubahan inventori). Hal ini menggambarkan untuk memperoleh penambahan output senilai satu juta rupiah dalam rentang periode tersebut dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 5,66 juta rupiah. Besaran koefisien ICOR mencerminkan produktivitas dari pengeluaran barang modal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan. Semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan semakin efisien.

Lapangan usaha dengan koefisien ICOR terkecil adalah pertanian, kehutanan dan peternakan, sebesar 2,34. Artinya setiap penambahan Rp. 1 juta

output memerlukan investasi sebesar Rp. 2,34 juta. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan peternakan relatif cukup tinggi. Sebagian besar komoditas pertanian mempunyai proses produksi kurang dari satu tahun, dan sebagian besar inputnya merupakan input primer. Sementara input antara (*intermediate cost*) sebagian besar digunakan untuk pembelian benih/bibit, pupuk, dan pestisida/obat-obatan.

Tabel 4.13. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag=0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2012-2016

Lapangan Usaha	PMTB + Δ Inventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,34	2,24
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,33	2,23
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,23	3,09
c. Perikanan	1,61	1,54
2. Pertambangan & Penggalian	3,13	3,01
3. Industri Pengolahan	5,34	5,12
4. Pengadaan Listrik & Gas	15,16	14,53
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,90	5,65
6. Konstruksi	4,78	4,58
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,49	4,30
8. Transportasi & Pergudangan	13,53	12,97
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,38	6,12
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	3,81
b. Penyediaan Makan Minum	7,10	6,81
10. Informasi & Komunikasi	5,90	5,66
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,81	2,69
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32
b. Lainnya	4,53	4,34
12. Real Estate	4,68	4,48
13. Jasa Perusahaan	5,53	5,30
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,92	6,64
15. Jasa Pendidikan	5,13	4,92
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,48	5,25
17. Jasa lainnya	5,37	5,15
PDRB	5,66	5,43

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Selanjutnya, lapangan usaha yang mempunyai koefisien ICOR terkecil kedua adalah jasa keuangan dan asuransi, dengan nilai ICOR 2,81. Artinya, untuk meningkatkan output senilai Rp. 1 juta diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 2,81 juta. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang relatif besar dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat kapital intensive. Selain itu proses produksinya juga relatif cepat.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mempunyai nilai ICOR sebesar 3,13. Artinya setiap penambahan Rp. 1 juta output memerlukan investasi sebesar Rp. 3,13 juta. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian relatif cukup tinggi. Sebagian besar aktivitas pertambangan dan penggalian di DIY berupa penggalian batu dan pasir yang merupakan usaha mikro dan kecil dan tidak memerlukan barang modal yang besar.

Lapangan usaha yang mempunyai angka ICOR pada kisaran 4-7 adalah industri pengolahan (5,34); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,90); konstruksi (4,78); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (4,49); penyediaan akomodasi dan makan minum (6,38); informasi dan komunikasi (5,90); real estate (4,68); jasa perusahaan (5,53); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (6,92); jasa pendidikan (5,13); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,48); serta jasa lainnya (5,37). Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan mempunyai ICOR yang relatif tinggi yaitu masing-masing sebesar 15,16 dan 13,53.

4.4.2.3. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar

Secara umum angka ICOR dengan metode standar seperti pada Tabel 4.14 tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan menggunakan metode akumulasi (Tabel 4.13). Untuk beberapa lapangan usaha nilai ICOR dengan metode standar lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan metode akumulasi. Sedangkan untuk beberapa lapangan usaha lainnya justru sebaliknya. Namun perbedaan hasil penghitungan nilai ICOR dengan kedua

metode tidak terlalu besar. Pada metode akumulasi akan menghilangkan pengaruh angka ekstrim pada suatu tahun tertentu. Sedangkan metode standar tidak bisa menghilangkan pengaruh angka sangat ekstrim yang dapat menyebabkan bias. Meskipun demikian, metode standar dapat mengidentifikasi kegiatan lapangan usaha yang kurang efisien atau kapasitas produksi terpasang belum dimanfaatkan secara penuh.

Pemilihan metode penghitungan ICOR tergantung pada asumsi yang digunakan atau prediksi keadaan riil di lapangan. Misalnya karakteristik masing-masing lapangan usaha, teknologi yang digunakan, sistem manajemen, kondisi pasar, dan sebagainya. Selain itu, faktor daya tarik masing-masing lapangan usaha di mata para investor dan berbagai kebijakan serta peraturan pemerintah juga mempengaruhi perbedaan koefisien ICOR pada masing-masing lapangan usaha.

Angka ICOR pada Tabel 4.14 merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan metode standar lag=0 dan diasumsikan produksi berada pada kondisi *full capacity*. Dengan demikian, investasi yang ditanamkan sepenuhnya digunakan untuk menaikkan output. Pendekatan investasi yang digunakan pada perhitungan metode ini adalah dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori.

Berdasarkan pendekatan investasi sama dengan PMTB plus perubahan inventori, selama periode 2012-2016 diperoleh ICOR DIY sebesar 5,66. Jika ditinjau menurut lapangan usaha, maka lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha ekonomi yang mempunyai ICOR relatif rendah. Lapangan usaha tersebut lebih bersifat *labor intensive*. Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan perolehan ICOR relatif tinggi. Kedua aktivitas ekonomi tersebut lebih bersifat *capital intensive*.

Koefisien ICOR lapangan usaha pertanian yang relatif kecil bisa disebabkan oleh proses produksi pertanian masih sangat tergantung kepada alam. Peranan sumber daya alam masih cukup besar dalam menentukan produksi/output. Dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, mekanisasi

pertanian masih terbatas dan biaya produksi masih didominasi oleh *primary cost* atau nilai tambah bruto. Sementara porsi *intermediate cost*, yaitu input yang habis dalam satu kali produksi, relatif kecil. Demikian juga halnya dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian di DIY yang bersifat labor intensive karena pada umumnya merupakan usaha mikro/kecil dan tidak menggunakan barang modal yang besar.

Tabel 4.14. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag=0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2012-2016

Lapangan Usaha	PMTB + Δ Inventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,22	2,12
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,22	2,13
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,59	3,44
c. Perikanan	1,62	1,55
2. Pertambangan & Penggalian	3,26	3,13
3. Industri Pengolahan	5,19	4,98
4. Pengadaan Listrik & Gas	15,00	14,38
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,86	5,62
6. Konstruksi	4,78	4,58
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,48	4,29
8. Transportasi & Pergudangan	13,52	12,96
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,39	6,12
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	3,81
b. Penyediaan Makan Minum	7,11	6,82
10. Informasi & Komunikasi	5,91	5,66
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,88	2,76
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32
b. Lainnya	4,47	4,29
12. Real Estate	4,67	4,47
13. Jasa Perusahaan	5,49	5,26
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,91	6,62
15. Jasa Pendidikan	5,09	4,88
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,48	5,25
17. Jasa lainnya	5,29	5,07
PDRB	5,66	5,43

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Sedangkan tingginya angka perolehan ICOR untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas karena investasinya biasanya bersifat berjangka

panjang dan padat modal. Akibatnya nilai investasi yang relatif besar pada saat ini belum tentu langsung diikuti oleh naiknya nilai tambah kedua lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang, bisa mencapai 30 tahun untuk mencapai *break even point (BEP)*. Untuk lapangan usaha pengangkutan dan perdagangan, tingginya angka ICOR disebabkan oleh besarnya nilai investasi yang diperlukan untuk pembelian mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Lapangan usaha ini termasuk dalam lapangan usaha ekonomi yang bersifat padat modal.

Tabel 4.15. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2016

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,22	2,50	2,81
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,22	2,45	2,71
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,59	3,86	4,16
c. Perikanan	1,62	1,73	1,85
2. Pertambangan & Penggalian	3,26	2,95	2,58
3. Industri Pengolahan	5,19	4,53	3,85
4. Pengadaan Listrik & Gas	15,00	12,80	10,55
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,86	4,94	4,05
6. Konstruksi	4,78	4,42	4,01
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,48	4,61	4,74
8. Transportasi & Pergudangan	13,52	12,63	11,66
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,39	6,92	7,49
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	4,29	4,65
b. Penyediaan Makan Minum	7,11	7,73	8,36
10. Informasi & Komunikasi	5,91	5,28	4,61
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,88	2,81	2,71
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32	2,20
b. Lainnya	4,47	4,38	4,24
12. Real Estate	4,67	4,57	4,43
13. Jasa Perusahaan	5,49	5,38	5,21
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,91	7,18	7,44
15. Jasa Pendidikan	5,09	5,35	5,59
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,48	5,75	6,01
17. Jasa lainnya	5,29	5,56	5,81
PDRB	5,66	5,55	5,36

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Tabel 4.16. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag=0, Lag=1, dan Lag=2, dengan Pendekatan Investasi=PMTB, 2012-2016

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,12	2,36	2,69
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,13	2,30	2,57
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,44	3,61	4,01
c. Perikanan	1,55	1,63	1,76
2. Pertambangan & Penggalian	3,13	2,84	2,48
3. Industri Pengolahan	4,98	4,15	3,53
4. Pengadaan Listrik & Gas	14,38	12,28	10,12
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,62	4,72	3,86
6. Konstruksi	4,58	4,17	3,79
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,29	4,58	4,71
8. Transportasi & Pergudangan	12,96	11,92	11,02
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,12	6,77	7,32
a. Penyediaan Akomodasi	3,81	4,18	4,52
b. Penyediaan Makan Minum	6,82	7,60	8,22
10. Informasi & Komunikasi	5,66	5,04	4,40
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,76	2,65	2,56
a. Jasa Perantara Keuangan	2,32	2,17	2,06
b. Lainnya	4,29	4,14	4,01
12. Real Estate	4,47	4,32	4,18
13. Jasa Perusahaan	5,26	5,08	4,92
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,62	6,78	7,03
15. Jasa Pendidikan	4,88	5,31	5,55
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,25	5,71	5,96
17. Jasa lainnya	5,07	5,52	5,76
PDRB	5,43	5,30	5,11

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Hasil penghitungan koefisien ICOR dengan asumsi investasi yang dilakukan pada tahun tertentu baru akan menghasilkan output yang diinginkan setelah satu tahun dan dua tahun berikutnya disajikan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16. Secara total koefisien ICOR dengan *time lag* 1 dan *time lag* 2 mengalami penurunan, yaitu dari 5,66 pada lag 0 menjadi 5,55 pada lag 1, dan menjadi 5,36 pada lag 2. Hal ini mengindikasikan produktivitas kapital yang semakin meningkat atau proses produksi semakin efisien.

Jika dicermati lebih lanjut, ada sepuluh (10) lapangan usaha yang mengalami penurunan angka ICOR pada lag=1 dan lag=2 jika dibandingkan dengan nilai ICOR lag=0 yaitu: pertambangan dan penggalian; industri

pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesepuluh lapangan usaha tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan produktivitas kapital dicerminkan dengan kenaikan koefisien ICOR yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

4.4.2.4. Keterbandingan ICOR

Perbandingan hasil perhitungan ICOR dengan metode standar dan metode akumulasi disajikan pada Tabel 4.17. Penghitungan ICOR dengan metode standar dilakukan dengan cara menghitung ICOR pada masing-masing tahun selama periode 2012-2016, kemudian dihitung nilai rata-ratanya selama periode tersebut. Sementara nilai ICOR dengan metode akumulasi diperoleh dari akumulasi nilai investasi selama periode 2012-2016 dibagi dengan akumulasi pertambahan PDRB selama periode yang sama. Hasil perhitungan ICOR dengan metode standar jika dibandingkan dengan ICOR metode akumulasi pada periode 2012-2016 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Perbedaan hasil penghitungan yang agak besar terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian serta lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, terutama pada sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu. Seperti diketahui lapangan usaha kehutanan merupakan kegiatan yang memiliki proses produksi relatif cukup panjang, sejak penanaman hingga dapat dipetik hasilnya memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun.

Tabel 4.17 juga menyajikan perkembangan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010. Indeks perkembangan agregat PDRB menunjukkan tingkat perkembangan masing-masing lapangan usaha

dibandingkan dengan kondisi pada tahun dasar (2010). Berdasarkan angka indeks tersebut, kita bisa mengidentifikasi lapangan usaha yang berkembang relatif cepat dibandingkan dengan yang lain.

Tabel 4.17. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan PDRB, dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2012-2016

Lapangan Usaha	ICOR 2012-2016				Indeks Perkem- bangan PDRB 2016, 2010=100	LPE Rata-rata 2012-2016
	Standar			Akumu- lasi		
	Lag-0	Lag-1	Lag-2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,22	2,50	2,81	2,34	107,3	0,92
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	2,22	2,45	2,71	2,33	106,4	0,67
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	3,59	3,86	4,16	3,23	109,1	2,01
c. Perikanan	1,62	1,73	1,85	1,61	126,4	4,23
2. Pertambangan & Penggalian	3,26	2,95	2,58	3,13	116,4	1,63
3. Industri Pengolahan	5,19	4,53	3,85	5,34	121,9	4,46
4. Pengadaan Listrik & Gas	15,00	12,80	10,55	15,16	154,0	7,25
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,86	4,94	4,05	5,90	114,7	2,52
6. Konstruksi	4,78	4,42	4,01	4,78	133,4	5,06
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,48	4,61	4,74	4,49	143,2	5,81
8. Transportasi & Pergudangan	13,52	12,63	11,66	13,53	130,1	4,56
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,39	6,92	7,49	6,38	144,2	6,30
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	4,29	4,65	3,97	161,3	7,18
b. Penyediaan Makan Minum	7,11	7,73	8,36	7,10	140,6	6,10
10. Informasi & Komunikasi	5,91	5,28	4,61	5,90	155,7	6,44
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2,88	2,81	2,71	2,81	157,7	8,23
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32	2,20	2,42	164,9	9,54
b. Lainnya	4,47	4,38	4,24	4,53	140,2	4,89
12. Real Estate	4,67	4,57	4,43	4,68	142,2	5,73
13. Jasa Perusahaan	5,49	5,38	5,21	5,53	141,9	5,38
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,91	7,18	7,44	6,92	139,3	5,50
15. Jasa Pendidikan	5,09	5,35	5,59	5,13	141,4	5,69
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,48	5,75	6,01	5,48	150,0	6,57
17. Jasa lainnya	5,29	5,56	5,81	5,37	140,4	5,96
PDRB	5,66	5,55	5,36	5,66	135,6	5,16

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)
Keterangan : LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terutama sub kategori jasa perantara keuangan; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas; serta

lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial berkembang relatif lebih pesat dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks perkembangan yang relatif lebih tinggi yaitu sebesar 157,7 untuk lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; 155,7 untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi; 154,0 untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas; dan 150,0 untuk lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan angka indeks perkembangan di atas 150 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun nilai tambah lapangan usaha tersebut sudah meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Sedangkan untuk lapangan usaha yang lain mempunyai nilai indeks perkembangan di bawah 150. Secara umum perekonomian DIY pada tahun 2016 telah meningkat sebesar 35,6 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2010.

4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi

Kebutuhan investasi selama periode 2017-2021 dihitung berdasarkan angka ICOR dengan metode standar untuk periode 2012-2016 dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB plus perubahan inventori (lihat Tabel 4.7). Target pertumbuhan ekonomi yang digunakan diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D.I. Yogyakarta, hasil proyeksi berdasarkan data pada periode sebelumnya, serta informasi dari instansi terkait. Hasil penghitungan kebutuhan investasi berdasarkan target pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY dan masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 18 sampai dengan Tabel 23.

Selama periode 2012-2016, koefisien ICOR Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 5,80 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,66 persen per tahun. Target pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2017 sebesar 5,21 persen. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi sebesar 38,39 triliun rupiah. Pada tahun 2018, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,24 persen, diperlukan investasi sebesar 42,80 triliun rupiah. Pada tahun 2019 untuk target pertumbuhan 5,27 persen dan diperlukan investasi sebesar 47,74 triliun rupiah. Pada tahun 2020 dengan target pertumbuhan 5,29 persen diperlukan investasi sebesar 53,25 triliun rupiah. Dan pada tahun 2021, untuk mencapai target

pertumbuhan sebesar 5,32 persen diperlukan investasi sebesar 59,42 triliun rupiah.

Tabel 4.18. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2021

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	5,21	92.257.049	4.569.123	28,03	25.861.234	38.388.932
2018	5,24	97.089.272	4.832.222	28,17	27.350.379	42.802.374
2019	5,27	102.201.061	5.111.789	28,31	28.932.727	47.735.515
2020	5,29	107.609.992	5.408.931	28,45	30.614.549	53.251.010
2021	5,32	113.334.827	5.724.835	28,59	32.402.566	59.419.243

Catatan:

ICOR Standar 2012-2016	5,66
Implisit Investasi 2016	140,80
PDRB Konstan 2016	87.687.927
Asumsi Laju Implisit	5,80

Tabel 4.19. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo, 2017-2021

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	4,88	6.901.974	321.197	29,83	2.058.924	3.078.465
2018	4,97	7.244.972	342.998	30,35	2.198.674	3.472.824
2019	5,06	7.611.445	366.472	30,86	2.349.147	3.919.764
2020	5,15	8.003.208	391.764	31,38	2.511.267	4.426.602
2021	5,24	8.422.237	419.029	31,89	2.686.043	5.001.711

Catatan:

ICOR Standar 2012-2016	6,41
Implisit Investasi 2016	141,54
PDRB Konstan 2016	6.281.566
Asumsi Laju Implisit	5,64

Di Kabupaten Kulonprogo ICOR rata-rata selama periode 2012-2016 sebesar 6,41 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,64 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 4,88 persen pada tahun 2017, diperlukan investasi sebesar 3,08 triliun rupiah. Pada tahun 2019 target pertumbuhan ekonomi Kulonprogo sebesar 5,06 persen, sehingga diperlukan investasi sebesar 3,92

triliun rupiah. Nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen pada tahun 2020 dan 5,24 persen pada tahun 2021 masing-masing sebesar 4,43 triliun rupiah dan 5,00 triliun rupiah.

Tabel 4.20. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, 2017-2021

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	5,00	17.196.739	818.755	22,69	3.901.114	5.867.333
2018	5,19	18.088.461	891.721	23,49	4.248.777	6.769.215
2019	5,22	19.033.013	944.553	23,65	4.500.501	7.595.520
2020	5,09	20.001.327	968.313	23,07	4.613.714	8.248.398
2021	5,04	21.008.925	1.007.598	22,85	4.800.892	9.092.076

Catatan:

ICOR Standar 2012-2016	4,76
Implisit Investasi 2016	141,98
PDRB Konstan 2016	16.377.984
Asumsi Laju Implisit	5,93

Di Kabupaten Bantul nilai ICOR rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 4,76 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,93 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen pada tahun 2017 diperlukan investasi sebesar 5,87 triliun rupiah. Pada tahun 2018-2021 target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai secara berturut-turut adalah 5,19 persen, 5,22 persen, 5,09 persen, dan 5,04 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 6,77 triliun rupiah (2018), 7,60 triliun rupiah (2019), 8,25 triliun rupiah (2020), dan 9,09 triliun rupiah (2021).

Selama periode 2012-2016, rata-rata ICOR di Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,56 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,59 persen. Pada tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sebesar 4,90 persen. Dengan demikian, diperlukan investasi sebesar 4,71 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan 4,93 persen pada tahun 2018 diperlukan investasi sebesar 5,26 triliun rupiah. Nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 4,97 persen pada tahun 2019 dan 5,05 persen pada tahun 2021 adalah sebesar 5,87 triliun rupiah dan 7,33 triliun rupiah.

Tabel 4.21. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2017-2021

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	4,90	12.270.198	572.751	25,93	3.181.767	4.710.787
2018	4,93	12.875.670	605.472	26,12	3.363.535	5.258.498
2019	4,97	13.515.925	640.255	26,32	3.556.766	5.871.672
2020	5,01	14.193.169	677.243	26,51	3.762.244	6.558.342
2021	5,05	14.909.756	716.587	26,70	3.980.806	7.327.550

Catatan:

ICOR Standar 2012-2016	5,56
Implisit Investasi 2016	140,21
PDRB Konstan 2016	11.697.447
Asumsi Laju Implisit	5,59

Di Kabupaten Sleman, ICOR rata-rata lima tahun terakhir sebesar 6,52 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,21 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46 persen pada tahun 2017 diperlukan investasi sebesar 15,97 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan 5,50 persen pada tahun 2018 diperlukan investasi sebesar 18,02 triliun rupiah. Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen dan 5,65 persen pada tahun 2020 dan 2021 diperlukan investasi masing-masing sebesar 23,04 triliun rupiah dan 26,07 triliun rupiah.

Tabel 4.22. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2017-2021

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	5,46	31.188.630	1.614.735	33,75	10.525.032	15.967.838
2018	5,50	32.904.004	1.715.375	33,98	11.181.016	18.015.719
2019	5,56	34.733.467	1.829.463	34,33	11.924.655	20.406.279
2020	5,60	36.678.541	1.945.074	34,57	12.678.224	23.042.208
2021	5,65	38.750.879	2.072.338	34,86	13.507.743	26.073.305

Catatan:

ICOR Standar 2012-2016	6,52
Implisit Investasi 2016	142,85
PDRB Konstan 2016	29.573.895
Asumsi Laju Implisit	6,21

Tabel 4.23. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, 2017-2021

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	5,28	24.781.910	1.243.808	25,06	6.210.774	9.030.122
2018	5,35	26.107.139	1.325.229	25,35	6.617.336	10.143.520
2019	5,44	27.527.373	1.420.234	25,76	7.091.731	11.460.811
2020	5,53	29.050.759	1.523.386	26,18	7.606.806	12.960.537
2021	5,63	30.686.247	1.635.488	26,61	8.166.569	14.669.587

Catatan:

ICOR Standar 2012-2016	4,99
Implisit Investasi 2016	137,91
PDRB Konstan 2016	23.538.102
Asumsi Laju Implisit	5,43

Di Kota Yogyakarta dengan ICOR rata-rata selama periode 2012-2016 sebesar 4,99 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,43 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen pada tahun 2017 diperlukan investasi sebesar 9,03 triliun rupiah. Dalam periode 2018-2021 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan yang ingin dicapai berturut-turut sebesar 5,35 persen (2018), 5,44 persen (2019), 5,53 persen (2020), dan 5,63 persen (2021). Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan investasi masing-masing sebesar 10,14 triliun rupiah (2018), 11,46 triliun rupiah (2019), 12,96 triliun rupiah (2020), dan 14,67 triliun rupiah (2021).

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, karena anggaran pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota relatif terbatas. Oleh karena itu, pihak swasta dan rumah tangga diharapkan turut berperan dalam penanaman modal di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk investasi swasta baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi. Beberapa hal berikut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, prioritas untuk melakukan investasi dilakukan pada lapangan usaha dengan koefisien ICOR kecil. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar.

Meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi, lapangan usaha ini bisa menjadi prioritas dalam berinvestasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengatasi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *backward* dan *forward linkages* tinggi. Investasi pada lapangan usaha tersebut akan mempunyai *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya.

Tabel 4.24. Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian	27,82	28,18	25,42	23,08	23,27
2 Pertambangan, Listrik, Gas dan Air Minum	0,86	0,77	0,29	0,96	1,25
3 Industri Pengolahan	14,97	13,36	14,91	14,61	12,83
4 Konstruksi	6,92	5,54	4,84	8,19	6,55
5 Perdagangan, Hotel, dan Restoran	24,52	25,87	26,64	25,67	28,89
6 Transportasi & Komunikasi	3,27	3,48	3,78	3,23	3,68
7 Lembaga Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perushn	3,06	2,87	3,37	3,00	2,78
8 Jasa-jasa	18,58	19,93	20,75	21,25	20,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah tenaga kerja (orang)	1 911 720	1 886 071	1 956 043	1 891 218	2 042 400

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari Sakernas)

Berdasarkan hasil penghitungan angka ICOR selama periode 2012-2016, maka lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan akomodasi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha real estate; dan lapangan usaha konstruksi adalah lapangan usaha dengan angka ICOR relatif rendah. Sedangkan jika dilihat dari serapan tenaga kerja, maka lapangan usaha perdagangan, pertanian, jasa-jasa, dan industri merupakan lapangan usaha dengan kemampuan serapan tenaga kerja yang relatif cukup tinggi (Tabel 4.24).

Sedangkan jika dilihat dari dampak penggandanya (*multiplier effects*), maka lapangan usaha industri pengolahan mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi (BPS DIY dan BAPPEDA DIY, 2012).

Berdasarkan beberapa indikator tersebut di atas, maka lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena lapangan usaha tersebut mempunyai ICOR yang relatif rendah dan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Prioritas investasi berikutnya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, serapan tenaga kerja yang tinggi, serta ketersediaan sumber daya lahan dan air yang relatif memadai di DIY. Prioritas investasi selanjutnya adalah lapangan usaha industri pengolahan, meskipun angka ICOR relatif agak tinggi namun mempunyai serapan tenaga kerja yang tinggi (12,83%), dan dari hasil penghitungan Tabel *Input Output* Provinsi DIY 2010 mempunyai *forward* dan *backward linkages* yang relatif tinggi. Lapangan usaha jasa-jasa juga bisa menjadi prioritas investasi lainnya, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi pula meskipun lapangan usaha ini mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi. Jika pertimbangan utamanya hanya nilai ICOR, maka lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi serta lapangan usaha penyediaan akomodasi bisa dijadikan pilihan dalam melakukan investasi di DIY.

Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan dan penggalian meskipun mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi, karena potensi sumber daya alam tambang dan mineral relatif kecil. Potensi lapangan usaha ini sebagian besar berupa bahan galian batu dan pasir. Selain itu, perlu upaya bersama untuk melindungi daerah aliran sungai (DAS) dari kerusakan lingkungan. Dengan pertimbangan nilai ICOR yang relatif tinggi, untuk lapangan usaha listrik dan air bersih serta lapangan usaha pengangkutan bukan merupakan pilihan prioritas investasi. Kedua lapangan usaha tersebut lebih bersifat *capital intensive*. Namun demikian, untuk jangka panjang investasi untuk lapangan usaha ini tetap diperlukan karena outputnya diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi.

Sedangkan jika dilihat dari skala usaha, investasi sebaiknya diprioritaskan pada skala usaha mikro dan kecil (UMK). Berdasarkan dari hasil Sensus

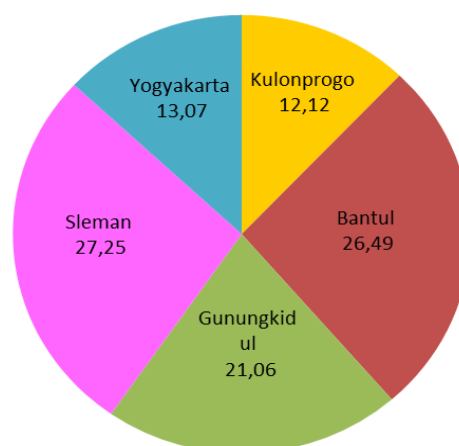
Ekonomi 2016, mayoritas usaha di Provinsi DIY merupakan usaha mikro dan kecil (98,36%). Sedangkan jumlah usaha menengah dan besar (UMB) hanya mempunyai *share* kurang dari dua persen dari jumlah seluruh usaha di DIY.

Tabel 4.25. Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di Provinsi DIY menurut Skala Usaha, 2016

Skala Usaha	Perusahaan/Usaha (Unit)		Tenaga Kerja (Orang)	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Mikro-Kecil (UMK)	524.935	98,36	1.044.498	78,98
Usaha Menengah-Besar (UMB)	8.735	1,64	278.044	21,02
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Jika dilihat secara spasial, jumlah perusahaan/usaha masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul (Gambar 4.8). Dari 533.670 perusahaan/usaha non-pertanian di DIY, sekitar 27,25 persen berada di Kabupaten Sleman, 26,49 persen berlokasi di Kabupaten Bantul, dan 21,06 persen di Kabupaten Gunungkidul. Sisanya tersebar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo masing-masing sebesar 13,08 persen dan 12,12 persen. Investasi seharusnya diarahkan ke seluruh wilayah DIY untuk mencapai pemerataan antar wilayah sesuai dengan potensi masing-masing. Melihat karakteristik unit usaha tersebut maka perlu upaya yang keras untuk mendorong peran investasi swasta dan rumah tangga.



Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Gambar 4.8. Distribusi Usaha/Perusahaan Non-Pertanian di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota, 2016 (persen)

4.6. Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi

Hubungan ICOR, Investasi Bruto (*Gross Domestic Investment*) dan Tabungan Bruto (*Gross Domestic Saving*) dapat diturunkan dari persamaan identitas model makro ekonomi berikut:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

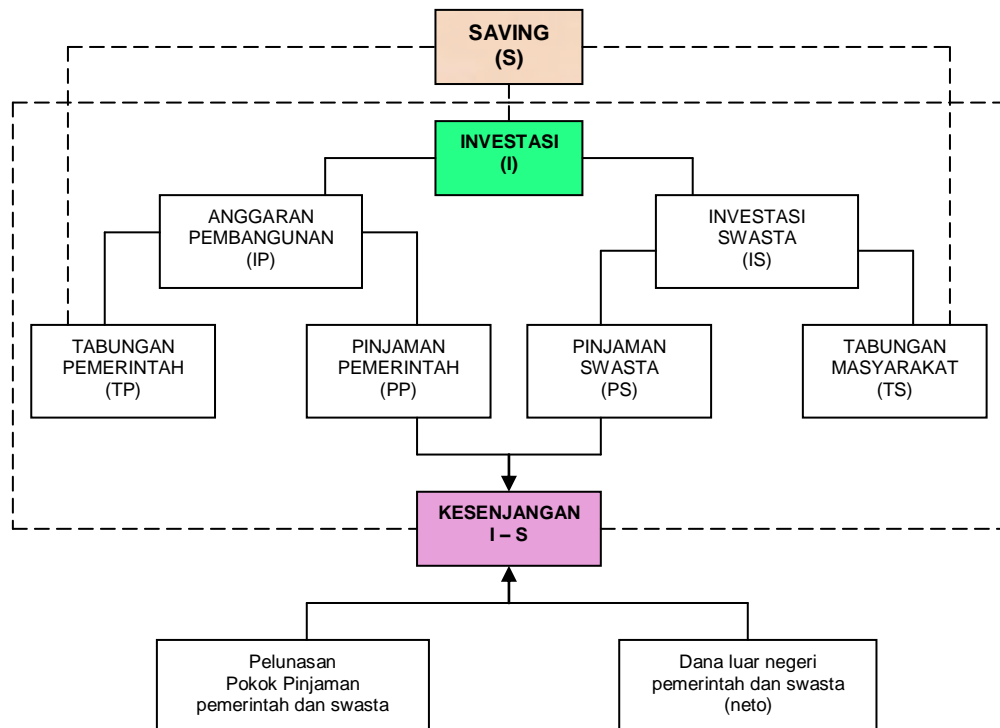
keterangan:

- Y = Pendapatan Nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB)
- C = Konsumsi Rumah Tangga
- G = Konsumsi Pemerintah
- I = Investasi
- X = Ekspor
- M = Impor

Berdasarkan persamaan di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Nasional (PDB) suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah digunakan untuk konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I), dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor/X – M). Rasio investasi (I) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi investasi domestik bruto (*gross domestic investment*/GDI); sedangkan rasio tabungan (S) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi tabungan domestik bruto (*gross domestic saving*/GDS), di mana tabungan sama dengan investasi ditambah ekspor neto {I+(X-M)}.

Untuk mengetahui kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 4.9. Teori **Two Gap Model** menunjukkan adanya **defisit** terhadap sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil dari kebutuhan investasi (**I-S = Resource Gap**) (Widodo, 1990).

Dari Gambar 4.9, secara ringkas dapat diuraikan bahwa investasi diperlukan untuk memenuhi anggaran pembangunan seperti yang tercantum dalam APBN(D) dan kebutuhan investasi oleh swasta. Kebutuhan ini dibiayai dengan tabungan pemerintah dalam APBN(D), jika belum mencukupi maka dipenuhi melalui pinjaman atau bantuan luar negeri. Selain itu juga dipenuhi dari tabungan masyarakat dan pinjaman swasta. Pinjaman pemerintah bersama-sama dengan pinjaman swasta inilah merupakan kesenjangan antara investasi dengan tabungan.



Sumber: Widodo, 1990

Gambar 4.9. Kesenjangan Investasi dan Tabungan

Perkembangan angka ICOR, GDI, GDS, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut. Ada beberapa kecenderungan utama dari perkembangan indikator di atas. Pertama, dari periode 2013 sampai dengan 2015 ICOR cenderung meningkat yang berarti proses produksi cenderung kurang efisien. Kedua, *Gross Domestic Investment* (GDI) juga cenderung meningkat, Hal ini merupakan sinyal yang cukup baik karena menunjukkan porsi PDRB yang diinvestasikan kembali semakin meningkat. Di sisi lain, perkembangan *Gross Domestic Saving* (GDS) juga cenderung menurun. Dengan kondisi GDI yang semakin meningkat dan GDS cenderung menurun, maka secara umum gap antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) cenderung meningkat. Keadaan ini dapat diinterpretasikan bahwa porsi pembiayaan investasi dari luar DIY cenderung meningkat. Semakin besar I-S gap akan semakin besar pula porsi nilai tambah yang akan masuk dari luar DIY. Sebagai contoh, pembangunan hotel-hotel besar, mall atau super mall kemungkinan besar investasinya berasal dari luar DIY. Ketiga, ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi DIY semakin melambat selama periode

2013-2015 dari 5,47 persen pada tahun 2013 menjadi 5,17 persen pada tahun 2014 dan kembali melambat pada tahun 2015 menjadi 4,95 persen. Kemudian pada tahun 2016 perekonomian DIY mengalami sedikit akselerasi dengan laju pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Keempat, tingkat inflasi cenderung pada level di bawah ambang psikologis (*double digit*).

Tabel 4.26. Perkembangan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi di Provinsi DIY, 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ICOR	5,48	5,36	5,70	5,91	5,85
GDI	28,63	29,69	30,94	31,49	31,54
GDS	17,82	13,82	12,57	12,16	12,72
LPE	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05
IS-Gap(%)	10,81	15,88	18,37	19,34	18,82
Nominal IS-Gap (miliar Rp.)	8 353	13 482	17 054	19 619	20 718
INFLASI	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 4.10. Perkembangan GDI dan GDS di Provinsi DIY, 2010-2016

Investasi baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah diperlukan untuk membiayai pembangunan wilayah. Pada tahun 2011 hingga 2016 kemampuan DIY untuk investasi dengan dana sendiri mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan gap GDI dan GDS yang cenderung melebar (Gambar 4.10). Untuk mengatasi kebutuhan investasi tersebut diperlukan investasi dari luar DIY, baik luar provinsi maupun luar negeri. Untuk mendorong masuknya investasi dari luar, diperlukan iklim investasi di DIY yang

kondusif. Selain itu, perlu dipacu jiwa *entrepreneurship* dari masyarakat DIY sehingga berani melakukan investasi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan ikut menggerakkan roda perekonomian daerah.

Daya saing daerah juga merupakan salah satu faktor yang menentukan masuknya investasi ke daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi secara instan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing investasi antara lain: ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kelembagaan, serta infrastruktur diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan akses serta kejelasan prosedur perijinan dalam kegiatan investasi. Kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan seperti tingkat bunga, aturan perpajakan, dan laju inflasi juga mempengaruhi iklim investasi daerah (Mankiw, 2007).

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasi, adalah kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal lainnya yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan lapangan usaha swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus mampu membuat *business planning map* tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan *feasibility-study* yang matang. Perlu dibentuk kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Selain itu, juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR di DIY selama periode 2012-2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama periode 2012-2016 pertumbuhan ekonomi DIY rata-rata mencapai 5,16 persen per tahun. Tiga lapangan usaha yang berkembang cukup pesat adalah jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 8,23 persen, 7,25 persen, dan 6,57 persen per tahun
2. Investasi di DIY selama periode pengamatan terus meningkat dan pada tahun 2016 mencapai Rp. 34,72 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 24,66 triliun atas dasar harga konstan 2010. Ditinjau dari sisi spasial, investasi terbesar terjadi di Kabupaten Sleman dengan kontribusi sekitar 41,29 persen kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo dengan kontribusi masing-masing 23,19 persen, 15,76 persen, 12,08 persen, dan 7,68 persen. Sedangkan jika ditinjau menurut lapangan usaha, 5 (lima) aktivitas ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar selama periode 2012-2016 secara berturut-turut adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sekitar 15,14 persen; kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 12,67 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 11,61 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 10,31 persen; dan jasa pendidikan sebesar 8,45 persen. Sementara lapangan usaha yang lain sumbangannya kurang dari 8 persen.
3. Hasil penghitungan ICOR Total DIY pada tahun 2016 sebesar 5,85. Angka ICOR ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,91. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,05 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4,95 persen. Jika dibandingkan dengan ICOR provinsi di kawasan

Jabalnusra, DIY menempati urutan tertinggi ke-lima setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

4. Hasil penghitungan ICOR baik dengan metode standar maupun akumulasi, dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda. Lapangan usaha dengan ICOR di bawah 5 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; pertambangan dan penggalan; perdagangan; real estate; serta konstruksi. Sementara lapangan usaha dengan ICOR di atas 10 adalah pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan.
5. Dalam periode 2012-2016, rata-rata ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 6,52. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dengan nilai ICOR masing-masing sebesar 6,41; 5,56; 4,99; dan 4,76.
6. Kebutuhan investasi semakin meningkat dengan meningkatnya target pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen pada tahun 2017, 5,27 persen pada tahun 2019, dan 5,32 persen pada tahun 2021, DIY membutuhkan investasi masing-masing sebesar 38,39 triliun rupiah, 47,74 triliun rupiah, dan 59,42 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo sebesar 4,88 persen (2017), 5,06 persen (2019), dan 5,24 persen (2021) diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar Rp. 3,08 triliun, Rp. 3,92 triliun, dan Rp. 5,00 triliun. Dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,00 persen (2017), 5,22 persen (2019), dan 5,04 persen (2021), diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 5,87 triliun (2017), Rp. 7,60 triliun (2019) dan Rp. 9,09 triliun (2021). Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90 persen (2017), 4,97 persen (2019), dan 5,05 persen (2021), Kabupaten Gunungkidul membutuhkan investasi masing-masing sebesar Rp. 4,71 triliun, Rp. 5,87 triliun, dan Rp. 7,33 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman sebesar 5,46 persen (2017), 5,56 persen (2019), dan 5,65 persen (2021) diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar Rp. 15,97 triliun, Rp. 20,41 triliun, dan Rp. 26,07 triliun. Target pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,28 persen (2017), 5,44 persen (2019), dan 5,63 persen (2021). Untuk mencapai target

tersebut diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 9,03 triliun (2017), Rp. 11,46 triliun (2019) dan Rp. 14,67 triliun (2021).

7. Gross Domestic Investment (GDI) selama periode 2012-2016 cenderung meningkat dan Gross Domestic Saving (GDS) cenderung menurun, sehingga gap antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) cenderung meningkat.

5.2. Rekomendasi

1. Memberikan perhatian kepada Kabupaten Kulonprogo dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investor untuk berinvestasi (investasi di Kabupaten Kulonprogo paling rendah) dan meningkatkan efisiensi investasi (relatif tingginya nilai ICOR menunjukkan ketidakefisienan investasi di Kabupaten Kulonprogo) sehingga ketimpangan investasi maupun pendapatan di DIY dapat berkurang.
2. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi lebih difokuskan pada lapangan usaha yang efisien investasinya (rendah nilai ICOR-nya), yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; pertambangan dan penggalian; perdagangan; real estate; serta konstruksi.
3. Memberikan perhatian pada lapangan usaha yang tidak efisien (nilai ICOR relatif tinggi), yaitu pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan yang salah satunya dengan cara mengupayakan sumber energi yang harganya lebih terjangkau.
4. Investasi dari luar DIY sangat diperlukan seiring dengan semakin meningkatnya *gap* antara GDI (*gross domestic investment*) dan GDS (*gross domestic saving*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1988. Ekonomi Pembangunan. Edisi Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- BPS. 2004. Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri Pengolahan Tahun 1990-2002. Jakarta
- BPS DIY. 2007. Analisis Profil Perusahaan/Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2006. Hasil Listing Sensus Ekonomi 2006. Yogyakarta
- BPS DIY. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut lapangan Usaha 2011-2015. Yogyakarta.
- BPS DIY. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut Pengeluaran 2011-2015. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2003. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1998-2002. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2009. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2004-2008. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2010. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005-2009. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. Analisis Pembentukan Investasi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006-2010. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2007-2011. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. Tabel Input-Output Daerah Istimewa Yogyakarta 2010. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2013. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2012. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2014. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2009-2013. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2015. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2014. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2016. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2015. Yogyakarta

- Effendi, D.P. 1992. ICOR. Stok Kapital. dan ILOR. BPS. Jakarta
- Glassburner, B dan A. Chandra. 1979. Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro. LP3ES. Jakarta
- Hess, P. and C. Ross. 1997. Economic Development; Theories. Evidence. and Policies. The Dryden Press. Orlando.
- Mankiw, N.G. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Salim, A. 2010. Pengembangan Investasi Daerah: Agenda Pemerintah Daerah. diakses dari <http://agusjero.blogspot.com/2010/09/pengembangan-investasi-daerah-agenda.html>
- Sutomo, S. 2015. Sistem Data dan Perangkat Analisis Ekonomi Makro. Corleone Books – Publishing House of Litera Media. Bandung.
- Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widodo, Hg.S.T. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta

Lampiran 1. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	8.640.412	9.449.020	9.769.112	10.793.840	11.456.173
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	7.632.052	8.347.274	8.545.055	9.442.590	10.036.121
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	707.784	750.208	816.386	902.903	955.185
c. Perikanan	300.576	351.538	407.671	448.346	464.867
2. Pertambangan & Penggalan	467.147	495.039	537.599	573.133	593.156
3. Industri Pengolahan	10.242.468	11.563.734	12.614.921	13.303.468	14.547.753
4. Pengadaan Listrik & Gas	90.992	86.394	101.944	118.012	141.794
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	83.130	89.645	102.670	109.697	114.765
6. Konstruksi	7.350.632	8.060.750	8.722.682	9.499.917	10.286.734
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6.413.319	6.938.421	7.681.035	8.342.646	9.332.038
8. Transportasi & Pergudangan	4.256.792	4.783.127	5.313.233	5.765.069	6.253.137
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.203.278	8.284.061	9.324.121	10.383.391	11.255.100
a. Penyediaan Akomodasi	1.395.507	1.665.470	1.814.460	2.050.478	2.273.996
b. Penyediaan Makan Minum	5.807.771	6.618.590	7.509.661	8.332.913	8.981.104
10. Informasi & Komunikasi	7.331.839	7.572.219	7.897.507	8.244.242	8.957.494
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.696.113	3.170.933	3.602.561	4.028.358	4.342.146
a. Jasa Perantara Keuangan	1.928.290	2.342.862	2.702.048	3.058.441	3.280.899
b. Lainnya	767.823	828.071	900.513	969.917	1.061.247
12. Real Estate	5.429.459	5.815.245	6.497.271	7.116.820	7.808.289
13. Jasa Perusahaan	836.060	855.439	956.391	1.048.359	1.115.194
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5.931.304	6.702.819	7.492.246	8.379.232	9.217.108
15. Jasa Pendidikan	6.364.492	6.816.002	7.600.855	8.598.744	9.088.421
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.928.468	2.094.674	2.276.361	2.553.551	2.764.049
17. Jasa lainnya	1.981.955	2.147.020	2.351.975	2.589.171	2.824.990
PDRB	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 2. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,64	10,41
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	9,88	9,83	9,20	9,31	9,12
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,92	0,88	0,88	0,89	0,87
c. Perikanan	0,39	0,41	0,44	0,44	0,42
2. Pertambangan & Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
3. Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,11	13,21
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,12	0,10	0,11	0,12	0,13
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6. Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,36	9,34
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,22	8,48
8. Transportasi & Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
a. Penyediaan Akomodasi	1,81	1,96	1,95	2,02	2,07
b. Penyediaan Makan Minum	7,52	7,79	8,09	8,21	8,16
10. Informasi & Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
a. Jasa Perantara Keuangan	2,50	2,76	2,91	3,01	2,98
b. Lainnya	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96
12. Real Estate	7,03	6,85	7,00	7,02	7,09
13. Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,26	8,37
15. Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17. Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 3. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7.500.728	7.670.026	7.508.980	7.667.602	7.779.801
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	6.588.237	6.741.415	6.539.528	6.666.703	6.766.495
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	654.158	657.700	680.933	700.237	708.450
c. Perikanan	258.333	270.911	288.519	300.662	304.857
2. Pertambangan & Penggalan	443.627	461.014	470.735	471.323	473.299
3. Industri Pengolahan	9.435.888	10.084.213	10.469.749	10.693.036	11.234.804
4. Pengadaan Listrik & Gas	110.270	116.969	124.960	127.701	145.910
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	78.992	79.740	82.855	85.260	87.268
6. Konstruksi	6.772.476	7.106.855	7.508.543	7.826.701	8.250.608
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5.878.432	6.187.855	6.540.108	6.944.903	7.367.624
8. Transportasi & Pergudangan	3.975.070	4.217.507	4.377.850	4.541.309	4.750.561
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.480.399	6.942.541	7.414.021	7.842.132	8.274.501
a. Penyediaan Akomodasi	1.188.626	1.289.747	1.353.394	1.450.425	1.568.774
b. Penyediaan Makan Minum	5.291.773	5.652.794	6.060.627	6.391.707	6.705.728
10. Informasi & Komunikasi	7.503.158	7.969.970	8.458.713	8.891.145	9.630.639
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.341.598	2.610.919	2.826.934	3.060.733	3.213.222
a. Jasa Perantara Keuangan	1.652.024	1.898.022	2.086.229	2.273.369	2.378.617
b. Lainnya	689.574	712.897	740.705	787.363	834.605
12. Real Estate	5.116.888	5.322.004	5.735.457	6.082.489	6.395.209
13. Jasa Perusahaan	831.517	858.734	924.042	991.564	1.025.558
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5.373.904	5.639.412	5.971.986	6.304.911	6.656.183
15. Jasa Pendidikan	6.148.737	6.430.386	6.938.845	7.444.277	7.672.850
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.791.076	1.916.374	2.062.979	2.210.406	2.310.356
17. Jasa lainnya	1.919.689	2.012.931	2.119.326	2.288.950	2.419.533
PDRB	71.702.449	75.627.450	79.536.082	83.474.441	87.687.927

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,46	10,14	9,44	9,19	8,87
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	9,19	8,91	8,22	7,99	7,72
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,91	0,87	0,86	0,84	0,81
c. Perikanan	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35
2. Pertambangan & Penggalian	0,62	0,61	0,59	0,56	0,54
3. Industri Pengolahan	13,16	13,33	13,16	12,81	12,81
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,15	0,15	0,16	0,15	0,17
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
6. Konstruksi	9,45	9,40	9,44	9,38	9,41
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,20	8,18	8,22	8,32	8,40
8. Transportasi & Pergudangan	5,54	5,58	5,50	5,44	5,42
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,04	9,18	9,32	9,39	9,44
a. Penyediaan Akomodasi	1,66	1,71	1,70	1,74	1,79
b. Penyediaan Makan Minum	7,38	7,47	7,62	7,66	7,65
10. Informasi & Komunikasi	10,46	10,54	10,64	10,65	10,98
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,27	3,45	3,55	3,67	3,66
a. Jasa Perantara Keuangan	2,30	2,51	2,62	2,72	2,71
b. Lainnya	0,96	0,94	0,93	0,94	0,95
12. Real Estate	7,14	7,04	7,21	7,29	7,29
13. Jasa Perusahaan	1,16	1,14	1,16	1,19	1,17
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,49	7,46	7,51	7,55	7,59
15. Jasa Pendidikan	8,58	8,50	8,72	8,92	8,75
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,50	2,53	2,59	2,65	2,63
17. Jasa lainnya	2,68	2,66	2,66	2,74	2,76
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 5. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Komponen	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	49.403.401	57.101.887	62.875.141	68.730.528	74.429.796
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.096.682	2.457.182	2.948.427	3.171.193	3.220.070
3. Konsumsi Pemerintah	11.982.950	13.629.834	15.347.428	17.214.154	18.441.761
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	21.148.871	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978
5. Perubahan Inventori/Stok	969.334	967.150	980.197	1.151.797	1.295.788
Investasi (4 + 5)	22.118.205	25.217.854	28.724.991	31.950.678	34.724.766
6. Ekspor Barang dan Jasa	40.254.421	44.738.868	52.453.603	58.504.294	64.690.398
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	48.607.799	58.221.083	69.507.107	78.123.196	85.408.451
PDRB	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 6. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	63,95	67,24	67,72	67,75	67,60
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,71	2,89	3,18	3,13	2,92
3. Konsumsi Pemerintah	15,51	16,05	16,53	16,97	16,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	27,38	28,56	29,88	30,36	30,36
5. Perubahan Inventori/Stok	1,25	1,14	1,06	1,14	1,18
Investasi (4 + 5)	28,63	29,69	30,94	31,49	31,54
6. Ekspor Barang dan Jasa	52,11	52,68	56,50	57,67	58,76
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	62,92	68,56	74,87	77,01	77,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 7. PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Komponen	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	43.559.244	45.670.009	47.923.893	50.193.386	52.614.164
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1.897.631	2.095.397	2.317.123	2.384.374	2.357.344
3. Konsumsi Pemerintah	10.909.808	11.553.432	12.056.063	12.719.134	12.987.746
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19.207.890	20.190.810	21.358.622	22.286.615	23.616.948
5. Perubahan Inventori/Stok	804.880	832.540	930.599	974.645	1.045.164
Investasi (4 + 5)	20.012.770	21.023.350	22.289.222	23.261.260	24.662.112
6. Ekspor Barang dan Jasa	35.527.171	37.531.260	40.089.136	41.978.121	43.877.316
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	40.204.176	42.245.998	45.139.355	47.061.834	48.810.755
PDRB	71.702.449	75.627.450	79.536.082	83.474.441	87.687.927

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 8. Distribusi PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2012-2016 (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,75	60,39	60,25	60,13	60,00
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,65	2,77	2,91	2,86	2,69
3. Konsumsi Pemerintah	15,22	15,28	15,16	15,24	14,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	26,79	26,70	26,85	26,70	26,93
5. Perubahan Inventori/Stok	1,12	1,10	1,17	1,17	1,19
Investasi (4 + 5)	27,91	27,80	28,02	27,87	28,12
6. Ekspor Barang dan Jasa	49,55	49,63	50,40	50,29	50,04
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	56,07	55,86	56,75	56,38	55,66
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 9. PMTB + Perubahan Inventori, ICOR, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, 2016

Provinsi	ADHK 2010 (Miliar Rp.)		% thd PDRB		ICOR		LPE (%)
	PMTB	PMTB + Δ Inventori	PMTB	PMTB + Δ Inv.	PMTB	PMTB + Δ Inv.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	664.857	674.107	43,19	43,79	7,82	7,93	5,85
Jawa Barat	313.084	357.682	24,55	28,04	4,57	5,22	5,67
Jawa Tengah	245.916	251.143	28,95	29,57	5,77	5,89	5,28
D.I. Yogyakarta	23.617	24.662	26,93	28,12	5,61	5,85	5,05
Jawa Timur	386.946	403.410	27,54	28,71	5,24	5,46	5,55
Banten	114.602	114.699	29,57	29,59	5,91	5,92	5,26
Bali	45.031	45.255	32,82	32,99	5,59	5,61	6,24
Nusa Tenggara Barat	27.710	28.086	29,31	29,71	5,33	5,40	5,82
Nusa Tenggara Timur	26.088	26.386	43,64	44,14	8,86	8,96	5,18
Indonesia	3.041.825	3.181.414	32,25	33,73	6,75	7,06	5,02

Sumber: BPS (Diolah)

Keterangan : LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 10. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	5.916.574	6.489.594	7.056.572	7.671.548	8.312.455
Bantul	14.510.832	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.924.970
Gunungkidul	10.545.355	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055
Sleman	25.732.249	28.295.363	30.912.239	33.826.505	36.991.415
Kota Yogyakarta	20.536.855	22.537.792	24.664.285	26.792.641	28.915.782
D I Y	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2012	2013	2014	2015*)	2016**)	Rata-rata 2012-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	4,37	4,87	4,57	4,62	4,76	4,71
2. Bantul	5,33	5,46	5,04	4,97	5,06	5,13
3. Gunungkidul	4,84	4,97	4,54	4,82	4,89	4,80
4. Sleman	5,79	5,89	5,30	5,18	5,25	5,41
5. Yogyakarta	5,40	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24
D I Y	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

Lampiran 12. PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2016 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.658.813	3.010.874	3.787.293	2.983.069	46.845
2. Pertambangan dan Penggalian	115.602	128.516	195.600	152.577	1.087
3. Industri Pengolahan	1.014.200	3.175.266	1.405.322	4.943.591	3.954.959
4. Pengadaan Listrik dan Gas	6.824	26.436	12.444	38.681	57.415
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.196	17.044	24.682	17.993	43.863
6. Konstruksi	710.844	1.943.455	1.407.758	3.960.104	2.265.492
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.131.565	1.770.132	1.381.432	2.883.200	2.130.472
8. Transportasi dan Pergudangan	669.411	1.002.784	755.287	2.691.432	1.155.211
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	324.991	2.442.216	883.857	3.803.368	3.863.756
10. Informasi dan Komunikasi	413.772	1.519.508	1.051.970	2.961.885	2.999.250
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	271.629	590.450	346.868	1.205.542	1.943.984
12. Real Estate	281.442	1.376.057	528.959	2.923.612	2.664.981
13. Jasa Perusahaan	23.425	100.785	64.966	618.776	311.413
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	760.655	1.571.240	1.405.268	2.520.299	2.927.108
15. Jasa Pendidikan	491.523	1.449.028	928.759	3.576.688	2.689.907
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.451	387.703	299.359	868.505	1.085.553
17. Jasa lainnya	307.111	413.475	502.231	842.094	774.487
PDRB	8.312.455	20.924.970	14.982.055	36.991.415	28.915.782

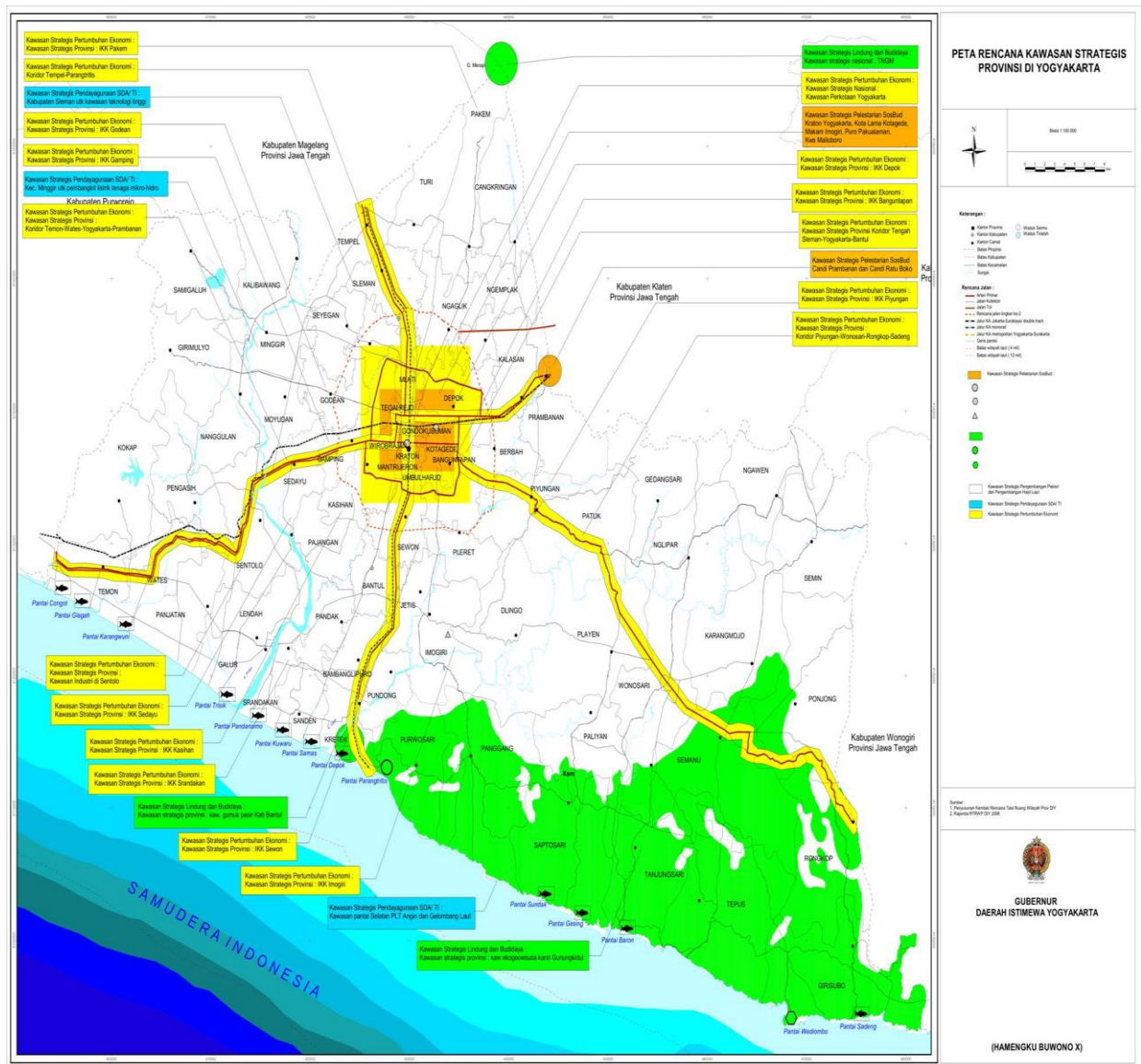
Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 13. Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)

Kabupaten/ Kota	Lapangan Usaha	Kontribusi (persen)		
		2012	2014	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,22	20,44	19,96
	2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13,33	13,16	13,61
	3. Industri Pengolahan	11,70	12,36	12,20
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,12	15,50	15,17
	2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,38	14,46	14,39
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,32	11,38	11,67
Gunungkidul	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,92	25,09	25,28
	2. Konstruksi	9,52	9,54	9,40
	3. Industri Pengolahan	9,07	9,59	9,38
Sleman	1. Industri Pengolahan	13,85	13,95	13,36
	2. Konstruksi	11,24	10,89	10,71
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,70	9,98	10,28
Yogyakarta	1. Industri Pengolahan	13,76	14,21	13,68
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,92	12,88	13,36
	3. Informasi dan Komunikasi	12,59	10,83	10,37

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 14. Peta Rencana Kawasan Strategis di Provinsi D.I. Yogyakarta



Lampiran 15. Peta Pengembangan Kawasan Sentra Produksi D.I. Yogyakarta

